



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

KOMISI
INFORMASI
PUSAT

BUKA

EDISI XIV-DESEMBER 2022



PEREMPUAN DAN HAK ATAS INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan
Informasi dan
Pemberdayaan
Perempuan

Menerobos
Batas
Kultural

KIP Rapatkan
Barisan Jelang
Pemilu

Mencegah
Informasi yang
Menyesatkan



MAJALAH KOMISI
INFORMASI PUSAT

DAFTAR ISI

Dari Redaksi

Wanita Inspiratif dan Akses Informasi Bermutu 3

Opini

Hak Atas Informasi, Jalan Memberantas Kekerasan dan Kesengsaraan untuk Perempuan 4

Menakar Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemilu 5

FKK POLHUKAM; Meningkatkan Kualitas Demokrasi 7

Cover Story

Melampaui Inspirasi 8

Informasi Yang Mengandung Pengetahuan 10

Keterbukaan Informasi Demi Pemberdayaan Perempuan 14

Kolaborasi Pemberdayaan Perempuan 18

Menghadapi “Garangnya” Kaum Pekerja 22

Dorong Perempuan Tahu Haknya 26

Dapur Koordinasi Reformasi Birokrasi 28

Menerobos Batas Kultural Perempuan 32

Komisi Informasi Harus Diperkuat 36

Bersuara Lantang Lewat “Suara Niluh” 38

Tak Lelah Mendorong Keterbukaan Informasi 40

Regional

Srikandi Komisi Informasi Daerah 42

Komisioner

MK KI Pusat Putuskan Permohonan Informasi Setelah 2 Kali Mangkir 46

National Assesment Council

Semua Ada Dalam 3 Seri Buku 48

Dokumentasi IKIP 2022

Indeks Keterbukaan Semakin Membaik 52

Komisioner

Komisi Informasi Rapatkan Barisan Demi PEMILU 56

Yang Dipercaya Publik 56

Event

Mencegah Informasi Yang Menyesatkan 60

Memompa Semangat Tim 66

Demi Informasi Yang Benar dan Berkualitas 68

BUKA

Majalah Komisi Informasi Pusat (KIP)

Pemimpin Umum

Donny Yoesgiantoro

Pemimpin Redaksi

Rospita Vici Paulyn

Board

1. Donny Yoesgiantoro
2. Arya Sandhiyudha
3. Rospita Vici Paulyn
4. Gede Narayana
5. Handoko Agung Saputro
6. Syawaludin
7. Samrotunnajah Ismail

Sekretaris Redaksi

Nunik Purwanti
Sukarni Lestari
Bernard Yuari Putranto

Redaktur

Annie Londa
Tya Tirtasari
Fathul Ulum

Reporter

Siti Azizah
Lenny Sulistianti
Melda Simamora
Karel Salim

Fotografer

Abdul Rahman
Ari Wijaya

Media Development & Strategy

Albert & Co

Graphic Designer

Ken Isaiiah

Penerbit

Komisi Informasi Pusat (KIP)
Republik Indonesia

Wisma BSG Lt. 9,
Jl. Abdul Muis No. 40,
Jakarta Pusat

Wanita Inspiratif dan Akses Informasi Bermutu

Majalah BUKA edisi 14, kembali menyapa pembaca sekalian. Kali ini topik yang diangkat mengenai “Perempuan, Keterbukaan Informasi dan Pemberdayaan”. Topik ini begitu luas dan besar untuk bisa diringkas dalam sebuah laporan utama kali ini. Karena berbagai aspek yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain seperti masalah sosial, kebudayaan, ekonomi, politik dan trend-trend yang terjadi begitu cepat.

Informasi yang masuk ke ruang privat pada awalnya bebas nilai. Ketika selanjutnya masuk ke asas manfaat apa tidaknya informasi tersebut bagi dirinya, di sinilah terjadi diskusi yang sangat mendalam, pro kontra serta perdebatan tingkat akademis hingga langkah aksi yang lebih operasional.

Pertanyaan yang paling fundamental misalnya mengenai kandungan informasi tersebut. Ternyata hanya sedikit yang memberikan manfaat nyata bagi mereka, seperti misalnya yang mengandung pengetahuan tentang parenting skills, pendidikan, keterampilan, atau pembinaan mental psikologis yang berguna bagi mereka dalam menjalankan peran mereka sebagai perempuan, ibu rumah tangga, pencari nafkah yang turut menopang ekonomi keluarga.

Faktanya informasi yang bermutu tersedia secara luas, namun terselip atau tertutup mendasarnya informasi “sampah” yang masuk ke dalam ruang privat seseorang melalui media sosial. Butuh keterampilan khusus mencari informasi yang berkategori bermutu dan mengandung pengetahuan.

Meningkatnya akses perempuan pada pendidikan formal harus diakui punya peran besar atas kemampuan seorang perempuan untuk mengakses informasi yang positif bagi diri maupun keluarganya. Kedewasaan, daya pikir kritis karena pendidikan mestinya mendorong perempuan untuk bijak memilih informasi yang positif dan mengandung pengetahuan positif demi melengkapi pendidikan formal seorang perempuan.

Situasi berbeda tentu saja terjadi pada perempuan dengan akses pendidikan rendah yang jumlahnya masih mayoritas di seluruh Indonesia. Ditambah dengan belum memadainya penyebaran informasi formal karena keterbatasan pemerintah dalam



menyediakannya, dukungan jaringan sarana telekomunikasi yang membuat informasi disebarkan dengan cepat dan berbiaya murah menjadi faktor yang menyebabkan akses pada informasi menjadi sangat terbatas.

Upaya pemerintah membangun jaringan telekomunikasi hingga pelosok diharapkan membuka banyak pintu bagi perempuan kelas menengah bawah mengakses informasi. Literasi dan pendidikan yang berkesinambungan untuk membuka wawasan, pengetahuan, keterampilan (skill) perlu dilakukan secara terus menerus.

Semua stake holder perlu terlibat secara nyata, baik pemerintah, organisasi sosial, keagamaan perlu terlibat secara gotong royong. Pandangan perempuan inspiratif di BUKA, hanya sebagai kecil dari berbagai iktiar untuk meningkatkan kesadaran kolektif tersebut.

Laporan BUKA lainnya seputar kick off kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) menandakan dimulainya efektifitas manfaat dan tingkat keterbukaan informasi pada Badan Publik untuk tahun 2023 mendatang. Masukan dari program tahun sebelumnya akan memperbaiki kualitas keterbukaan informasi lembaga publik dalam rangka memperbaiki layanan kepada masyarakat luas demi memperbaiki tata pemerintahan (good governance) dan konsolidasi demokrasi. ■

Hak Atas Informasi, Jalan Memberantas Kekerasan dan Kesengsaraan untuk Perempuan



Arya Sandhiyudha, Ph.D
Wakil Ketua Komisi
Informasi Pusat

Gagasan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diperjuangkan Komisi Informasi sejatinya tegak berdiri di atas landasan yang lebih luas dari lembaran UU 14/2008 soal KIP itu sendiri. Yaitu hak-hak dasar yang diabadikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan pelaksanaan hak ekonomi-sosial dan hak sipil-politik. Substansi gagasan KIP menjadi tren tata kelola pemerintahan paling mutakhir yang diusung oleh lebih dari 90 negara di seluruh dunia yang mengusung hak atas informasi (*universal access to information*) dalam konstitusi dasar atau undang-undang khusus.

Meskipun demikian, di banyak negara sebagian penduduknya secara fakta empiris masih terbatas aksesnya, menggunakan istilah populer di KI- "belum informatif". Artinya belum dapat sepenuhnya menikmati manfaat dari kehadiran hak atas informasi ini.

Perlakuan Asimetrik dalam Akses Informasi

Dalam titik pandang kami, termasuk di dalamnya apabila dilihat secara gender ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang utama bagaimana kegunaan, kecepatan, dan kerentanan bagi kaum perempuan dalam mengakses informasi. Dalam masyarakat dengan kultur patriarkis yang kental, kaum perempuan menjadi salah satu kategori populasi yang paling rentan, terpinggirkan, dan menderita karena akses informasi yang terbatas. Informasi karenanya sangat dibutuhkan untuk menjadi alat dalam mengatasi rantai kesengsaraan yang dihadapi perempuan seperti— kekerasan, kemiskinan, buta huruf, serta partisipasi yang sederajat dan berkualitas.

Kendati demikian, situasi ini tidak terjadi pada beberapa kelas perempuan tertentu atau perempuan kosmopolitan, dengan kultur urban yang kuat. Di sana 'keadilan dan kesederajatan gender' menjadi logika umum interaksi dan meritokrasi, aspirasi dan partisipasi, hingga afirmasi pemberdayaan perempuan.

Dalam konteks akses informasi oleh perempuan ini, kita musti memastikan kesamaan hak atas informasi, agar tidak terjadi kondisi asimetrik. Jangan sampai berulang kendala adat budaya dalam pembuatan kebijakan yang peka gender, atau pembiaran pada pengecualian perempuan untuk berpartisipasi dalam penyampaian pengaduan atau pengambilan

kebijakan dari level nasional hingga level desa sekalipun.

Harus diakui masih banyak penghalang pada pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), seperti kebodohan seperti buta huruf, serta imobilitas karir, yang berperan dalam menciptakan asimetri gender dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak atas informasi.

Sebagian perempuan sering menghadapi beban ganda, antara peran ekonomi mencari nafkah sambil mengurus keluarga mereka. Disadari, terlibatnya perempuan dalam pasar kerja selain untuk membantu ekonomi keluarga, juga karena makin banyak perempuan yang mengenyam pendidikan tinggi dan punya ambisi untuk menitik karir profesional. Dengan akses yang baik terhadap informasi, perempuan dapat memanfaatkan peluang untuk mengubah hidup, keluarga, dan masyarakat. Situasi berbeda memang perempuan yang punya minim akses pada informasi.

Dalam perspektif ekonomi akses informasi akan membantu mentransformasi ekonomi kaum perempuan. Setidaknya akan membantu dalam lima hal; 1. Memberdayakan perempuan untuk membuat keputusan yang lebih efektif, misalnya terkait dengan pendidikan, bisnis komersil, pengelolaan rumah tangga, dan perawatan kesehatan; 2. Memungkinkan perempuan untuk memahami dan menjalankan hak-hak mereka sepenuhnya; 3. Membantu perempuan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam kehidupan publik; 4. Membantu perempuan untuk terlibat meminta pertanggungjawaban pemerintah dan/atau Badan Publik; 5. Menghubungkan perempuan dengan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai pemberdayaan ekonomi.

Peran strategis KIP untuk perempuan pada intinya ingin memuliakan perempuan melalui peningkatan level akses informasi dan partisipasi, mendukung pemerintah dan/atau badan publik dalam memastikan akses yang adil bagi perempuan, dan meningkatkan kapasitas perempuan untuk menggunakan hak akses informasi untuk menanggulangi kekerasan dan menjalani pendakian ekonomi dengan cara yang bermakna dan transformatif. ■

Menakar Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemilu



Dr Usman Kansong
Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik
Kementerian Komunikasi dan Informasi

Sejarah pemilu kita, terutama dalam dekade terakhir ini, diwarnai dengan polarisasi dalam masyarakat. Bukan hanya karena pilihan yang berbeda, masyarakat terbagi dalam kubu-kubu akibat informasi yang turut meruncingkan perbedaan. Kebanyakan informasi yang beredar adalah disinformasi dan misinformasi yang tidak teredam oleh informasi resmi pihak-pihak termasuk badan publik yang terkait.

Kondisi demikian merupakan konsekuensi dari kondisi lanskap komunikasi digital yang semakin dinamis dan luas. Penyebaran informasi terkait pemilu dengan mudah tersebar luas ke masyarakat melalui media social dibandingkan media massa dan media resmi pemerintah, hingga kondisi masyarakat tersaturasi dengan informasi yang tidak jelas kredibilitasnya.

Dalam penelitian saya sewaktu menyusun disertasi kemarin, saya mengamati bagaimana media massa dan media sosial berpengaruh dalam polarisasi masyarakat. Aktor populis menggunakan media sosial untuk mengartikulasikan pesan-pesan populis tanpa harus melalui fungsi jurnalisme tradisional, semisal framing dan agenda setting.)

Sementara itu, media mengonstruksi platform komunikasi dan mengolah pesan berdasarkan kepentingan organisasional dan profesional, termasuk kepentingan politik tertentu. Di luar apa yang aktor populis dan media massa lakukan, disinformasi, misinformasi, dan malinformasi juga menyebar melalui media sosial. sehingga polarisasi masyarakat menguat.

Kondisi ini mungkin saja dapat terulang lagi di pemilu mendatang. Yang perlu kita lakukan adalah menyusun langkah nyata apa yang dapat Komisi Informasi dan badan publik lakukan untuk memitigasi krisis tadi.

Untuk itu, badan publik (BP) diharapkan untuk tidak diam saja ketika informasi yang tidak benar menyebar di media-media lain. Jangan pula masyarakat sulit untuk mendapat informasi yang jelas bila mereka memiliki pertanyaan mengenai penyelenggaraan pemilu di daerah mereka.

Sebagaimana diketahui, beberapa hal dalam pemilu yang perlu diawasi terkait dengan isu keterbukaan informasi, yaitu di antaranya: sumber data (otentifikasi), akurasi data, akses public terhadap data, dan standar atau protokol akses data di lembaga penyelenggara pemilu.

Sering kali disinformasi berawal dari asumsi karena tidak ada penjelasan resmi dari pihak terkait. Seluruh tahapan pemilu maupun pilkada,

merupakan informasi yang harus diketahui oleh publik karena memiliki keterkaitan dengan kepentingan umum. Oleh karena itu, segala tahapan pelaksanaan pemilihan harus transparan dan akuntabel.

Implementasi demokrasi yang menyeluruh perlu didukung oleh interaksi yang baik antara Pemerintah dan masyarakatnya. Salah satu indikator bahwa demokrasi nyata adalah tingkat pengetahuan masyarakatnya yang memiliki akses untuk mendapatkan informasi yang faktual.

Komisi Informasi perlu berperan menjadi perwakilan publik yang melihat kebutuhan publik terhadap informasi publik di rangkaian Pemilihan Umum ini. Kebutuhan ini disampaikan kepada badan publik yang terlibat pemilu, misalnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) sebagai badan publik yang melakukan sosialisasi keikutsertaan pemilu, dan badan publik strategis lainnya yang terlibat.

Dalam mengukur keterbukaan informasi publik, transparansi dapat diukur berdasarkan ketersediaan informasi, aksesibilitas informasi dan kejelasan informasi. Saya kira akan sangat baik bila ada kesamaan pandangan dan pengertian antara lembaga terkait untuk dapat menghasilkan kesepakatan dan komitmen antara Komisi Informasi dan badan publik terkait terhadap ketiga hal tadi. Diharapkan bisa mengantisipasi kemungkinan terjadinya "krisis komunikasi publik" dengan strategi antisipatif yang memadai, misalnya soal ketersediaan data, kemudahan memperoleh informasi dan yang paling penting siapa yang paling berotoritas dalam komunikasi pemilihan umum. Bagikan informasi lebih awal untuk mengurangi celah bagi disinformasi dan asumsi menyebar dalam masyarakat.

Sikap terbuka merupakan langkah awal membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan masyarakatnya. Dengan kepercayaan publik yang tinggi, tingkat penerimaan publik terhadap kebijakan pemerintah juga ikut meningkat. Harapan untuk Pemilu dan Pilkada yang aman dan kondusif semakin tinggi. ■

FKK POLHUKAM; Meningkatkan Kualitas Demokrasi



Berbagai elemen bangsa dan penyelenggara negara, terutama badan publik semakin menyadari, keterbukaan informasi yang menjadi hak masyarakat, menjadi elemen penting dalam konsolidasi demokrasi. Tanpa itu, maka demokrasi itu hanya prosedural, tanpa makna yang dalam. Masyarakat misalnya berhak mengetahui bagaimana sebuah proses pengambilan kebijakan untuk hidup mereka diambil pemerintah.

Publik harus tahu bagaimana manajemen informasi publik ini dalam rangka meningkatkan akuntabilitasnya, namun ada beberapa kategori informasi yang terbatas dan rahasia yang apabila dibuka menyebabkan; (1) Dapat menghambat proses penegakan hukum; (2) informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; (3) informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan

negara. Selain dari pada itu, maka publik berhak tahu karena bagian dari hak dasarnya (right to know)

Untuk itu, pada tanggal September 2022, bertempat hotel Ambarukmo Yogyakarta diselenggarakan sebuah forum pertemuan dikoordinasi oleh Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam). Mengambil tema "Peningkatan Kualitas Demokrasi Melalui Keterbukaan Informasi Publik Nasional," yang diikuti peserta dari seluruh Komisi Informasi pusat dan daerah.

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Kominfortur; Kemenkopulhukam, Arif Mustofa, kehadiran UU KIP mewajibkan pemerintah untuk selalu menyediakan dan mengumumkan informasi yang bermanfaat demi memenuhi kebutuhan akan informasi yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi kecerdasan bangsa.

Arif melanjutkan, regulasi keterbukaan informasi publik merupakan fondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik (*good*

governance). UU KIP memang dimaksudkan untuk mendorong terciptanya proses demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, mendukung transparansi informasi di seluruh lembaga pemerintah yang merupakan salah satu prasyarat penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

Wakil ketua Komisi Informasi (KI) Dr Arya Sandhijudha, menambahkan Komisi Informasi Pusat telah mengumumkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2022 tingkat nasional dan provinsi. Penilaian ini merupakan yang kedua sejak dimulai tahun 2021. Dari hasil penilaian yang dilakukan oleh 306 informan ahli di 34 provinsi dan 17 informan ahli 4 tingkat nasional, diperoleh nilai IKIP Nasional di 74,43 (tingkat sedang), naik dari 71,37 di tahun 2021. Sementara di tingkat provinsi, nilai IKIP 20 provinsi di atas nilai nasional dan 14 provinsi di bawah nilai nasional. 3 Provinsi dengan nilai IKIP tertinggi (tingkat baik) adalah Jawa Barat, Bali dan NTB, sedangkan nilai terendah masih sama seperti tahun lalu, yaitu Papua Barat, Papua dan Maluku Utara.

Menurut Arif, urgensi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah: a) Mendorong pelaksanaan isu prioritas 2022 sesuai dengan rencana kerja Asdep Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa Tahun 2022, yaitu Peningkatan Skor Indeks Keterbukaan Informasi Publik; b) Untuk lebih meningkatkan peran PPID Utama di 34 Provinsi se Indonesia dan Badan Publik lainnya dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik secara proporsional. c) Kualitas demokrasi yang baik salah satunya ditentukan oleh indikator keterbukaan informasi publik, yang diwujudkan melalui peran dan komitmen Badan Publik menjalankan amanat UU KIP.

Lebih lanjut Arif mengatatan FKK dimaksudkan juga untuk sharing knowledge terkait implementasi keterbukaan informasi publik khususnya dalam rangka meningkatkan skor Indeks Keterbukaan Informasi Publik Nasional.

Lebih dari pada itu, tujuan pelaksanaan FKK mencari masukan untuk merumuskan solusi pengambilan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik bagi badan masyarakat (public). Selain itu juga dalam rangka sinkronisasi dan penyesuaian Program Kerja 2022 terkait bidang Informasi Publik.

Hadir pada forum tersebut antara lain Arif Mustofa, Deputy Bidang Koordinasi Kominfo, Novan Saleh, Asdep Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa. Selain itu pada sesi diskusi panel menghadirkan beberapa narasumber antara lain; Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Komisi Informasi Pusat RI, Rospita Vici Pauly; Kepala Pusat Penerangan



Kementerian Dalam Negeri RI, Benny Irwan, Staf Khusus Menkominfo RI, Rosarita Niken Widastuti; Yoseph Adi Prasetyo, Akademisi; Asisten Administrasi Umum Setda Bali, I Dewa Putu Sunartha; Asisten 2 Bidang perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Amry Rakhman; dan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Riena Retnaningrum; dengan peserta dari Kementerian, Sekda, PPID Utama, dan Komisioner Komisi Informasi dari 34 Provinsi di Indonesia. ■

Melampaui Inspirasi

Kaum perempuan Indonesia pantas berterima kasih kepada pahlawan seperti RA Kartini yang memperjuangkan persamaan hak perempuan atas lelaki. Kita juga harus angkat topi karena pemerintah Indonesia menempatkan program pemberdayaan perempuan sebagai bagian penting dalam program pembangunan pendidikan, sosial, ekonomi dan budaya bangsa ini selama puluhan tahun.

Namun kita juga harus mengakui semakin banyaknya perempuan Indonesia yang punya kedudukan penting dalam pemerintahan. Tanpa mengabaikan yang lain beberapa perempuan Indonesia seperti Megawati Soekarnoputri, Presiden Indonesia ke 5, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan adalah beberapa sosok inspiratif pasca

Informasi diharapkan mendorong perempuan untuk punya banyak pilihan yang positif dalam rangka memberdayakan dirinya sebagai perempuan, individu, ibu rumah tangga atau pelaku ekonomi dalam keluarga.

reformasi. Kehadiran mereka memberikan warna yang berbeda bagi praktek politik, social dan budaya bahkan citra Indonesia di mata dunia. Tidak termasuk perempuan yang sukses di dunia bisnis bahkan menduduki posisi puncak di perusahaan nasional dan multi nasional.

Jangan lupa pula ribuan perempuan inspiratif bertebaran di seluruh pelosok negeri, mengerjakan hal-hal berbeda tanpa dikenal public (*unsung heroes*). Lulu Lusiani (15) siswa SMP di pelosok Aceh setia merawat ibunda Rusdiani (52) yang lumpuh sejak lima tahun lalu.

Secara individu dan bersama, perempuan menunjukkan peran aktifnya bagi masyarakat. Kelompok perempuan di desa terpencil di Kabupaten Bener Meriah Aceh berhasil mengembangkan produk janeng dan aren. Kelompok yang dibina Katahati Institute ini berhasil menciptakan produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dipasarkan internasional. Mereka tidak menebang kayu, tapi memanfaatkan produk yang dihasilkan dari pohon aren. Karena permintaan tinggi tentu saja membuka peluang penanaman pohon aren yang lebih masih. Uang dapat, lingkungan pun makin hijau.

Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med., Ed., Sp.OG(K), Ph.D., berpendapat bahwa kampanye keterbukaan informasi di Badan Publik (BP) harus bisa mengedepankan program pemberdayaan perempuan. Dengan informasi yang tersedia katanya, perempuan akan punya banyak informasi dan mendorong dia memilih dan memilah informasi yang bermanfaat untuk dirinya. "Informasi diharapkan mendorong perempuan untuk punya banyak pilihan yang positif dalam rangka memberdayakan dirinya sebagai perempuan, individu, ibu rumah tangga atau pelaku ekonomi dalam keluarga," kata Ova.

Sebagai contoh misalnya di bidang reproduksi, informasi yang baik tentu akan memperkuat hak dia untuk memilih misalnya jumlah anak yang mampu dilahirkan dan dibesarkannya dengan mempertimbangkan hak dia sebagai perempuan serta kemampuan ekonomi keluarga yang dimilikinya.

Untuk itu soal pilihan hamil, kawin, jumlah anak harus dilihat dalam berbagai aspek. Untuk itu mereka, menurut Ova harus dididik dan disajikan informasi yang proporsional serta mengandung pengetahuan yang memadai misalnya soal hak asasi perempuan, kondisi kejiwaan serta adaptasi atas nilai-nilai budaya yang melingkupinya. Perempuan kata Ova harus bisa memilah informasi yang mengandung pengetahuan dan nilai-nilai kebaikan yang berguna bagi dia dan keluarga serta generasi mendatang. Peran perempuan dengan dibekali informasi yang positif akan membantu mereka menjadi tumbuh dan berkembang seutuhnya sesuai dengan perkembangan jaman.

Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardhani sependapat bahwa keterbukaan informasi harus bisa menargetkan kelompok paling marginal dan perempuan adalah salah satu dari mereka. Dengan berbagai program yang disesuaikan dengan kelas social perempuan diharapkan, makin banyak kaumnyan terlibat dalam urusan publik termasuk dalam perumusan kebijakan di bidang pemerintahan. Kondisi ini menurut, tokoh yang akrab dipanggil Dhani ini hanya bisa dicapai jika ada pendidikan yang memadai.

"Perempuan sebagai agen perubahan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung implementasi keterbukaan informasi publik. Peralunya, dengan meningkatnya literasi digital perempuan, diiringi kesadaran untuk mengakses informasi publik, maka representasi dan partisipasi perempuan terus meningkat," kata Dhani.

"Akses informasi yang luas, komunikasi yang mudah, serta pengetahuan tentang kelembagaan dan isu publik, membawa kesempatan luas perempuan untuk berkembang. Contohnya, perempuan yang melek teknologi, dan paham tentang informasi publik, suatu saat dapat mengakses pelatihan-pelatihan wirausaha dalam jaringan (*daring*) dari swasta maupun pemerintah. Mereka dapat mengembangkan potensinya sekaligus membaca peluang mengembangkan badan usahanya menjadi legal mengikuti langkah-langkah yang ada di situs pemerintah untuk mendaftarkan badan usahanya menjadi legal. Nah, transformasi digital yang inklusif, memberdayakan, dan terus berkelanjutan inilah

yang akan mengurangi angka ketimpangan gender dalam masyarakat,” tambah Dhani.

Dosen dan pengamat intelijen, Dr Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati punya pandangan yang cukup progresif. Selain mengamini pandangan dari berbagai pihak, dia melihat peran pemerintah atau komisi yang membidangi issue perempuan perlu diperluas dan diperkuat. Sebagai contoh, Komnas Perempuan misalnya, harus sudah memperkaya cakupan pekerjaannya seperti issue-issue strategis seperti perempuan dan terorisme, moderasi pemikiran di kalangan perempuan hinggaantisipasi trend global seperti perubahan iklim, persaingan geo politik serta masalah kontemporer global lainnya.

Selain tetap fokus pada tugas pokok seperti membela hak-hak perempuan seperti mengadvokasi mereka yang alami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), emansipasi serta hak-hak politik perempuan Susaningtyas berharap agar komisi ini membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada perempuan. Kendati di beberapa kebudayaan, perempuan masih belum bebas mengungkapkan sikap dan pandangannya, namun seiring pendidikan yang membaik, hak-haknya akan terpenuhi ditambah dengan akses terhadap informasi yang makin membaik.

Rektor Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Prof. Dr. Rina Indriastuti, S.E., M.SIE mengungkapkan informasi semestinya mengandung pengetahuan bagi pengembangan pribadi perempuan itu, tidak sekedar informasi. Dalam skala yang luas pendidikan perempuan membuat mereka akan mengerti hak-haknya sebagai perempuan. “Kita tidak minta hak besar, tapi perempuan harus teredukasi, pintar, berdaya, punya kemampuan ekonomi, sehingga mereka bisa membiayai diri mereka termasuk pendidikannya”katanya.

Emansipasi di lingkungan kampus Unpad sangat terasa karena jumlah tenaga akademik perempuan jumlahnya hampir sama dengan pria. Situasinya menurutnya merupakan hasil dari proses keterbukaan pada semua orang yang mampu di



bidang akademik. Menurut Rina informasi yang terbuka akan memberikan peluang yang sama bagi perempuan untuk bisa memberdayakan dirinya termasuk kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan produktif menunjang ekonomi rumah tangga. Dalam program kemahasiswaan, seperti kuliah kerja nyata (KKN), para mahasiswa memberikan porsi program yang lebih bagi pemberdayaan perempuan di pedesaan, seperti pelatihan di bidang kewirasusahaan.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai politisi, anggota DPR Rachel Maryam melibatkan perempuan muda untuk terlibat dalam kegiatan membangun jaringan di akar rumput, dengan memberikan bekal pendidikan politik yang memadai. Kepada kaum perempuan misalnya Rachel menekankan bahwa berpolitik tidak semata sebagai dunianya “laki” saja. Berpolitik sejatinya menurut mantan artis dan sutradara film ini, adalah bagian dari upaya melibatkan seluruh masyarakat termasuk perempuan agar mereka mampu menyuarakan kepentingan mereka baik sebagai pribadi maupun sebagai ibu rumah tangga. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Betty Epsilon Idroos, melihat dampak keterbukaan informasi terlihat dari makin tingginya perempuan aktif terlibat dalam politik. Secara statistik, jumlah pemilih perempuan dan laki-laki berimbang. Bahkan kebijakan afirmatif seperti jumlah keter-

wakilan politik perempuan dalam kepengurusan partai politik maupun di parlemen sangat mendorong partisipasi perempuan di Indonesia. Walaupun misalnya antara harapan dan kenyataan masih sedikit “jomplang” namun terlihat angkanya semakin membaik. Di DPR pusat misalnya jumlah anggota DPR perempuan berjumlah 120 orang atau sekitar 20 % dari total 575 anggota. Banyak kepala daerah juga adalah perempuan dan sangat berprestasi di bidangnya.

Komisioner Komisi Informasi Pusat (KI) Rospita Vici Paulyng mengatakan hak perempuan untuk tahu, terutama informasi publik yang menyangkut kepentingan dirinya perlu terus didorong. Komisi Informasi, katanya dengan serangkaian program yang dijalankan bertahun-tahun melalui kerja sama dengan berbagai pihak diyakininya akan membantu perempuan agar tercerahkan dengan berbagai informasi yang positif.

Inspirasi perempuan berprestasi ini semakin menunjukkan bukti bahwa keterbukaan, demokratisasi, transparansi sebagai asas dalam keterbukaan informasi telah secara langsung dan tak langsung memberikan pengaruh pada keterlibatan perempuan dalam urusan di dalam dan di luar rumah. Pekerjaan rumah, tentu saja masih banyak agar perempuan di daerah tertinggal semakin melek akan informasi demi pembangunan bangsa yang lebih baik. ■

Informasi Yang Mengandung Pengetahuan

Rektor Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. Rina Indriastuti, S.E., M.SIE melihat informasi yang deras masuk ke ruang publik seharusnya mengandung pengetahuan yang berbobot yang bisa mengubah penerimannya kepada kualitas hidup yang lebih baik atau positif. Kalau tidak maka informasi itu tidak bermakna apa-apa.

Rektor Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. Rina Indriastuti, S.E., M.SIE adalah satu dari sekian pejabat rektor perempuan di universitas negeri ternama di Indonesia. Selain dia, kini UGM juga punya seorang nahkoda perempuan Prof. dr. Ova Emilia, M.Med., Ed., Sp.OG(K), Ph.D. Dengan berkaca pada dirinya, rektor yang akrab disapa Rina ini sangat antusias betapa perempuan Indonesia sangat menikmati kesempatan terbuka dalam jabatan publik di tanah air, akibat alam demokrasi serta pencapaian Indonesia dalam bidang pendidikan.

Di level negara, tanpa ragu Rina menyebut Indonesia pernah dipimpin presiden perempuan, Ibu Megawati Soekarnoputri. Belum termasuk pejabat lain yang tersebar dalam berbagai bidang, termasuk jabatan strategis di kabinet Jokowi atau chief executive officer di perusahaan-perusahaan besar.

Menurut Rina, kendati secara umum, perempuan masih tertinggal dalam akses informasi atau pendidikan, namun di dunia akademis justru terjadi sebaliknya. "Kalo saya lihat contoh di pendidikan tinggi, saya meyakini bahwa perempuan semakin tereduksi, jadi akses pendidikan itu terbuka dan mereka punya peluang yang sama, serta punya kemampuan yang sama. Sehingga dengan porsi yang sama banyak dengan pria itu akan membuktikan bahwa perempuan punya tekad untuk tereduksi, jadi saya lihat perempuan sekarang akses untuk pendidikan semakin disadari oleh kaum perempuan bahwa hal tersebut penting", kata guru besar ekonomi dan industry ini.

Dia mengambil contoh di UNPAD. Jumlah dosen pria dan perempuan hampir seimbang. "Ya itu tadi bahwa perempuan mempunyai tekad untuk mendapatkan atau akses pada pendidikan tinggi itu lebih kuat, jadi punya cita-cita untuk berpendidikan tinggi ternyata makin ke sini makin kuat" katanya optimis.

Hingga level ini Rina yakin sekali perempuan Indonesia sudah menyadari kesetaraan hak-hak mereka dengan pria. "Kesetaraan dalam arti positif, kesetaraan untuk berpendidikan, semakin tinggi jenjangnya semakin kuat perempuan" sambungnya. Perempuan menyadari bahwa dengan pendidikan yang mereka sandang sangat bermanfaat bagi diri mereka serta keluarga. Karena itu perempuan harus memanfaatkan akses pada pendidikan dengan baik.

Selain secara alamiah kesetaraan terlihat dari jumlah dosen perempuan yang makin banyak, UNPAD juga melakukan rekayasa kelembagaan untuk memperkuat partisipasi perempuan. Antara lain dengan pendirian pusat studi kesetaraan gender, serta aksi langsung mendorong kesetaraan gender melalui kegiatan pengabdian masyarakat di luar lingkungan kampus.

Kegiatan itu misalnya para mahasiswanya terjun dalam kegiatan mengajar di daerah-daerah marjinal, atau setidaknya mendorong perempuan menempuh pendidikan minimal hingga tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Selain itu, para mahasiswa dan pengajar terlibat dalam advokasi perempuan misalnya bagi korban kekerasan seksual yang sering terjadi.





UNPAD juga melakukan riset mengenai kesetaraan gender, dan penguatan peran mereka dalam arti positif. "Kita tidak minta hak besar, tapi perempuan harus teredukasi, pintar, berdaya, punya kemampuan ekonomi, sehingga mereka bisa biayai diri mereka termasuk pendidikannya.

Dalam program kuliah kerja nyata (KKN), mahasiswa pun memberikan perhatian khusus pada perempuan, kendati bukan satu-satunya sasaran. Fokus utama kegiatan mereka adalah mendorong kaum perempuan bisa menghasilkan pendapatan bagi diri dan keluarganya. "Kegiatan KKN harus bisa memberdayakan perempuan dalam bidang kesehatan, akses pendidikan, dan last but not least pemberdayaan ekonomi perempuan," kata Rina.



MEMAKNAI KETERBUKAAN INFORMASI

Kendati sepakat dengan prinsip dasar keterbukaan informasi publik, apalagi berkenaan dengan pemeringkatan yang dilakukan oleh KIP, Rina memberi maknanya yang lebih spesifik soal konsep ini dalam kaitan dengan dunia akademis, apalagi perguruan tinggi. “Kami memaknai informasi itu adalah konten yang terinformasikan, artinya seseorang memiliki pengetahuan. Kami memaknai informasi itu sebagai pendidikan, serta edukasi dan membuat semua orang bergerak bersama dalam memaknainya,” kata rektor perempuan pertama UNPAD ini.

Rina yakin sekali hanya dengan

pendidikan yang baik seorang perempuan bisa punya akses pada informasi. “Akan tetapi informasi itu sebaiknya diserap dan dimaknai sebagai ilmu pengetahuan. Nah yang jadi pertanyaan adalah semua informasi yang diakses itu ada unsur pengetahuannya atau tidak. Jadi perlu memilah-milah informasi, apakah mengandung pengetahuan atau tidak,” tegas Rina.

Informasi, menurut Rina jangan dipandang sebagai sebuah benda yang diterima begitu saja. Keterbukaan informasi juga sesuatu yang mutlak diperlukan di saat ini. “Informasi itu, sesuatu yang hidup, tinggal jenis informasi seperti apa yang layak dibuka,

kepada siapa informasi tersebut diberikan. Dan yang penting adalah penerima informasi itu kelak mendapat pengaruh yang positif atau tidak, entah lebih pintar atau lebih baik hidupnya. Informasi yang terbuka akan membuat adil bagi semua orang, karena tidak ada yang ditutup-tutupi,” tanda Rina

Kendati perempuan yang duduk di jabatan publik masih sedikit dibanding pria, namun Rina melihat justru kualitaslah yang menentukan. “Kalau saya prinsipnya kualitas, sedikit tapi bermutu. Karena itu saya mengajak perempuan untuk berlomba-lomba membangun mutu pribadi sebaik mungkin,”



“Informasi sebaiknya diserap dan dimaknai sebagai ilmu pengetahuan. Dan perlu memilah-milah informasi, apakah mengandung pengetahuan atau tidak.”

Prof. Dr. Rina Indriastuti, S.E., M.SIE, Rektor Universitas Padjadjaran

terang doctor ekonomi dari Osaka Prefecture University Jepang ini.

Rina sudah kenyang di dunia birokrasi dan akademis. Sebelum menjabat, dia sudah pernah menjadi pembantu rektor bidang administrasi umum dan keuangan, tahun 2009-2012, wakil rektor bidang perencanaan, system informasi dan keuangan 3 tahun setelahnya. Kemudian berkarir sebagai sekretari direktur jenderal pembelajaran dan kemahasiswaan.

Prinsip kesamaan dalam kualitas juga yang membuat Rina yakin bahwa kompetisi terbuka memilih pemimpin termasuk rektor di universitas ternama di Bandung ini akan berlangsung dengan baik karena basisnya adalah track record.

“Karena di Unpad (menjadi rektor) tidak ditunjuk, akan tetapi melalui voting, jadi kami melihat track record yang baik dan kinerja menjadi faktor penentu utama. Siapa pun orang yang nanti menjadi pemimpin, sudah terlatih melayani, komunikatif dan menginformasikan segala hal yang memang perlu diketahui oleh publik dan sedang kami budayakan demikian”, terang Rina yang telah menulis karya ilmiah di jurnal internasional.

UNPAD menjalankan berbagai program pendidikan. Mulai dari Bahasa dan sastra Sunda hingga kedokteran. Ada 16 fakultas dan pasca sarjana dan puluhan jurusan diajarkan di sana. Sudah lama UNPAD “kuat” di bidang kedokteran, dengan masuk dalam peringkat 500 dunia menurut sebuah hasil survey QS World University Ranking. Namun dalam perjalannya, ilmu sosial, ekonomi juga terus diperkuat dan bisa menembus rangking yang sama. Hasil-hasil itu membuat sekolah kebanggaan warga Jawa Barat ini, menempati rangking 7 terbaik di Indonesia versi lembaga pemeringkat

yang sama. Kendati demikian, Rina akan terus mengembangkan cabang cabang ilmu lain yang sesuai dengan kebutuhan jaman.

Kendati kenyang dalam berbagai jabatan publik Rina mengakui bahwa, menjadi pemimpin itu juga harus bisa mengelola emosi, perasaan dalam rangka membangun sebuah team yang produktif serta kondusif, selain tentu kempaun organisasi, komunikasi dan leadership. Rina memiliki itu semua dan telah melewati berbagai rintangan. Maka tak heran dia berhasil menduduki jabatan struktural akademis tertinggi di UNPAD yang layak menjadi inspirasi bagi banyak orang terutama bagi kaum perempuan Indonesia. ■



Keterbukaan Informasi Demi Pemberdayaan Perempuan

Rektor Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med., Ed., Sp.OG(K), Ph.D sepakat akan pentingnya keterbukaan informasi bagi perempuan dalam rangka pemberdayaan mereka baik sebagai perempuan, ibu rumah tangga maupun sebagai professional bahkan jadi pemimpin.

Sebagai perempuan dengan pencapaian sosial yang tinggi, Ova menginspirasi banyak orang, terutama kaum perempuan agar bisa berprestasi dalam segala bidang. Informasi yang mengalir begitu deras di ranah publik bisa menjadi bekal yang memadai untuk bisa memperkaya diri, pengetahuan bahkan kebebasan memilih dalam hal yang kodrati seperti perkawinan, kehamilan bahkan memberikan persepektif baru dalam kehidupan social dan budaya di mana mereka terlibat.

Informasi sebagai pemberdayaan perempuan

Ova sepakat bahwa pada kelas sosial perempuan tertentu akses atas informasi sangat terbatas, terutama di daerah pedesaan terpencil, atau yang secara ekonomi terbatas. Akses ini menentukan level mobilisasi social perempuan ke level sosial lebih tinggi.

"Saya sangat setuju bahwa akses perempuan pada informasi harus jadi bagian dari program pemberdayaan sehingga membuat mereka menyadari tidak semua informasi harus dibaca, ditonton, seperti yang ada di social media dan lain sebagainya. Lebih dari pada itu dengan akses pada informasi yang bermutu, perempuan bisa punya opsi atas dirinya sendiri, misalnya soal jumlah anak, kesetaraan gender dengan lelaki, hingga pilihan untuk berumah tangga atau tidak dan lain sebagainya,"kata Ova.

Informasi yang berkualitas dan bermanfaat harus dikelola dan dimanfaatkan bagi kepentingan keluarga, generasi masa depan dan perempuan itu sendiri. Walau tidak ada pembatasan informasi seperti di China, namun Ova melihat harus ada pengaturan oleh pemerintah. Seperti contoh, serial TV di Korea selalu membawa mission yang ingin dicapai yakni untuk character building, tidak hanya sekedar hiburan misalnya bagaimana mengatur keuangan keluarga, sopan santun profesionalisme. Ova mencatat, dulu ada beberapa serial TV yang bermutu yang mendidik pemirsanya seperti serial "dr Sartika" yang legendaris menggambarkan mission sacre seorang dokter, yang tidak hanya melulu cari duit tapi demi kemanusiaan.

Kendati secara umum prosentasi keterbukaan sudah membaik namun Ova melihat perlu ada edukasi lebih lanjut. Dan bila perlu informasi publik itu jangan hanya ditampilkan yang "baik dan indah-indah" saja yang, tetapi sebaliknya yang negative yang bisa menjadi bahan diskusi.

Dalam bidang kesehatan misalnya, pilihan mempunyai anak-anak, ber KB misalnya selama ini terkesan sangat normative dan dalam





batas tertentu dibenturkan dengan dengan ajaran agama dan budaya. Hal itu diatasi dengan social marketing yang hebat, sehingga menggugah berbagai pihak agar berpikir positif dan mengubah cara pandang.

Dalam kasus lain, kematian perempuan karena kelahiran dianggap “biasa-biasa” saja dibanding kecelakaan transportasi yang beritanya jadi heboh. Padahal menurut dia, jumlah perempuan yang mati itu banyak sekali oleh berbagai sebab. Sebagai contoh, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah kematian ibu mencapai 4.627 jiwa pada 2020. Angka tersebut meningkat 10,25% dibandingkan dengan tahun sebelumnya hanya 4.197 jiwa. Penyebab kematian ibu



pada tahun lalu, antara lain diakibatkan oleh pendarahan (28,29%), hipertensi (23%), dan gangguan sistem peredaran darah (4,94%).

Demikian juga soal reproduksi perempuan. Perempuan harus punya pilihan, tentang jumlah anak. Harus ada kerja sama lintas masyarakat dan pemerintah untuk cegah stigma lawan suami jika tidak mau hamil. Secara publik harus dibicarakan sehingga perempuan ada pilihan. "Harus dibicarakan secara strategis antara stake holder bangsa. Soal pembatasan kehamilan misalnya, kementerian

agama juga perlu terlibat agar dapat pemahaman yang komprehensif dari sisi agama, sehingga perempuan punya pilihan.

Demikian juga soal kebiasaan merokok, karena anak-anak dan perempuan jadi korban, Masalah stunting misalnya, bukan semata karena kemiskinan, namun juga karena penghasilan pria lebih banyak untuk beli rokok dari pada untuk membeli susu buat anak-anaknya

Kekuatan perempuan menurut Ova, sebenarnya lebih banyak dibanding pria. Selain lebih luwes, perempuan

biasanya sangat detil, dan punya tanggung jawab besar menyelesaikan sesuatu. "Jadi kaum perempuan jangan ragu untuk jadi pemimpin," kata Ova. Dia tidak ragu soal partisipasi perempuan di perguruan tinggi. Di UGM misalnya belum lama ini perempuan lulus sarjana jumlahnya 60%, dari total lulusan.

Komitmen keterbukaan informasi di UGM tak diragukan lagi. Sejak menjadi dekan, Ova membuat kanal untuk khusus untuk publik misalnya dengan membuat video pendek tentang kedokteran. Menurut dia, ini

adalah cara perguruan tinggi berkontribusi pada publik. Tidak hanya informasi, bahkan dibuka kanal khusus yang mendorong perempuan bertanya apa saja mengenai hak-hak mereka sebagai perempuan di lingkungan kampus, termasuk kalau mereka diperlakukan tidak adil oleh lembaganya.

JADI REKTOR BUKAN CITA-CITA

Ova secara mengejutkan terpilih menjadi rektor UGM bulan Mei, 2022 lalu. Rektor perempuan ke-2 di UGM ini adalah guru besar pertama bidang pendidikan kedokteran, setelah menyelesaikan pendidikan master University of Dundee, Skotlandia pada 1990. Kemudian pendidikan dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi di UGM pada 2000. Pada 2009, ia menyelesaikan pendidikan S-3 Clinical Teaching di University of New South Wales Wales dan pendidikan dokter subspecialis di UGM.

Putri dari Prof. Zaini Dahlan, yang pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Indonesia dan UIN Sunan Kalijaga mengakui menjadi rektor universitas bukanlah tujuan dalam hidupnya. Lebih dari itu, dia menunjukkan passion yang tinggi pada pendidikan termasuk di bidang kedokteran.

Benih memimpin dan kesetaraan pria dan Wanita sudah ditanamkan sejak kecil dalam keluarga. "Saya kebetulan perempuan sendiri dalam keluarga, dari 4 bersaudara, Saya diperlakukan sama sejak kecil, dan ini bekal penting dari keluarga. Saya dapat kesempatan luar biasa dari keluarga yang mendorong untuk sekolah dan sekolah. Memang benar perempuan harus mendapat kesempatan belajar yang sama dengan pria. Ibu saya adalah seorang guru kepandaian putri sehingga selalu punya greget agar perempuan bisa mengejar mimpi berpendidikan tinggi," kata Ova.

Ova kecil tak pernah punya keinginan dan cita-cita jadi dokter. Sewaktu tamat SMA di Yogyakarta, Ova lebih tertarik menekuni bidang Teknik industry. Sayang jurusan tersebut hanya ada di Institut Teknologi Bandung (ITB). Kedua orang tuannya menginginkan agar Ova selalu

dekat dengan keluarga, apalagi dia satu-satunya perempuan dalam keluarga.

Karena itu walau dengan sedikit ragu, Ova pun akhirnya mendaftarkan diri di Fakultas Kedokteran UGM, sebagai pilihan kedua pada saat seleksi masuk universitas. Walau kurang "disukai" awalnya, justru pendidikan kedokteran, mengantarnya mencintai bidang khusus mengenai pendidikan klinis Kesehatan.

Ketika mengambil master pun Ova mengambil jurusan yang "kering" dari sisi materi. Dia berkelut dengan spesialis pendidikan klinik. Ova banyak

terlibat dalam disain kurikulum di kampusnya, menjadi tutor, hingga menghantarnya menjadi dekan di FK-UGM. "Saya suka mendidik, karena itu saya banyak terlibat dalam pendidikan kedokteran, walaupun saya juga punya spesialisasi sebagai dokter," katanya.

Kalau kemudian Ova menjadi Rektor, dia itu melihat sebagai akibat dari pencapaian, kerja keras, tanggung hadapi tantangan, kecintaan pada bidang pendidikan, fokus pada persoalan dan punya problem solving skills. "Menjadi rektor bukan tujuan dan tak pernah saya mimpikan," kata Ova. ■

Kekuatan perempuan menurut Ova, sebenarnya lebih banyak dibanding pria. Selain lebih luwes, perempuan biasanya sangat detil, dan punya tanggung jawab besar menyelesaikan sesuatu. "Jadi kaum perempuan jangan ragu untuk jadi pemimpin."

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med., Ed., Sp.OG(K), Ph.D,
Rektor Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta



Kolaborasi Pemberdayaan Perempuan

Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc. yang kini menduduki kursi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LKHK) adalah salah satu tokoh perempuan inspiratif. Karirnya sebagai birokrasi sangat lengkap. Dia meniti karir mulai dari seorang staff hingga puncak karir sebagai seorang pegawai negeri menjadi sekretaris jenderal, di kementerian dalam negeri, hingga di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bagi kalangan birokrasi, mencapai puncak karir seperti ini adalah resultante dari kecerdasan, ketekunan, profesionalisme, sikap inovatif serta mampu mengimplementasikan ilmu dan rangkaian pengalaman profesional dengan ketaatan pada aturan sebagai abdi negara (apparat negara).

Merasa karirnya mencapai puncak di usia yang relative muda, Siti kemudian berganti haluan menjadi seorang politisi. Pengalaman, jaringan luas, dan kemampuan teknokrasi selama menjabat sebagai sekjen DPR, membuat Partai besutan Surya Paloh, Partai Nasional Demokrasi (NASDEM) kesengsem memintangnya menjadi salah satu petinggi di partai tersebut. Kombinasi kemampuan professional serta kemampuan NASDEM melihat kekuatan Siti mengantarnya menduduki salah satu kursi di Kabinet Presiden Joko Widodo tahun 2014. Tidak hanya sekali, Ketika Joko Widodo kembali terpilih kedua kalinya, Siti pun dipercaya untuk melanjutkan tugasnya mengurus lingkungan dan kehutanan. "Saya minta Ibu Siti Nurbaya, untuk terus mengurus masalah lingkungan dan kehutanan" kurang lebih begitu kata Jokowi ketika mengumumkan susunan kabinetnya pada bulan Oktober 2019.

Banyak prestasi yang telah diraihinya. Di bawah kepemimpinnya titik hot spot, kebakaran hutan menjadi berkurang, menjadi paling sedikit selama 10 tahun. Tak kurang, anggota DPR Herman Haeruman memuji Siti sebagai menteri pekerja keras dan tahu apa yang dikerjakannya. Di bawah kepemimpinnya, ijin tambang di area kehutanan makin turun drastis. Alih-alih berpihak pada korporasi besar, Siti justru menerbitkan 6000 an ijin kepada masyarakat lokal di sekitar hutan untuk mengusahakan hutan untuk kegiatan ekonomi dengan luas areal terbatas. Siti terus mendorong perempuan untuk aktif dalam kegiatan penyelamatan lingkungan termasuk hutan.

HAK UNTUK TAHU

Menurut Siti, Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, dituntut untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi. Salah satu diantaranya adalah prinsip keterbukaan informasi sebagai perwujudan komitmen nyata dalam membangun pemerintahan yang terbuka, akuntabel, partisipatif dan inovatif.

"Indonesia juga merupakan salah satu inisiator berdirinya Open Government Partnership (OGP), yang merupakan inisiatif global untuk mempromosikan transparansi, memberdayakan warga negara, memerangi korupsi dan memanfaatkan teknologi baru



untuk memperkuat pemerintahan dalam sebuah tata kelola kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan,”kata politisi Nasdem ini.

Selanjutnya menurut Siti, sebagai anggota OGP dan salah satu inisiator, pemerintah Indonesia bersama organisasi masyarakat sipil, dapat duduk bersama menunjukkan langkah-langkah yang tepat untuk mendorong akses informasi secara luas terhadap kegiatan badan publik yang dibiayai negara serta pelayanan publik yang terjangkau, mudah dan berkualitas.

Pada prinsipnya, kata Menteri perempuan itu, semua orang berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, selain informasi-informasi yang telah dikecualikan dan tidak boleh kita berikan karena suatu hal. Negara, kata Siti yang pernah belajar di International Institute for Aerospace Survey and

Pada prinsipnya, semua orang berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, selain informasi-informasi yang telah dikecualikan dan tidak boleh kita berikan karena suatu hal.

Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc.,
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I.



“Sebagai salah satu amanat Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, saya sebagai Menteri, di Kementerian LHK telah mengamanatkan kepada seluruh jajaran, untuk terus aktif menyampaikan, melayani informasi publik melalui berbagai transformasi digital maupun kolaborasi integrasi.

Earth Science (ITC), Enschede, Belanda, , secara tegas menjamin hak warga negaranya untuk mendapatkan informasi sesuai amanat pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Dia melanjutkan, selain pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, juga menegaskan bahwa negara, pemerintah dan badan publik wajib untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara, dengan menyelenggarakan pelayanan informasi kepada publik. “Makin terbuka, akan makin dipercaya public sebaliknya kalau tertutup justru masyarakat makin curiga,” kata Doktor dari Intitut Pertanian Bogor (IPB) serta Siegen University Jerman ini.

Kementerianya, mempraktekkan prinsip keterbukaan. Selama beberapa tahun, kementerian KLHK meraih skor cukup tinggi dari sisi keterbu-

kaan informasi publik. “Sebagai salah satu amanat Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, saya sebagai Menteri, pimpinan tertinggi di Kementerian LHK telah mengamanatkan kepada seluruh jajaran, untuk terus aktif menyampaikan, melayani informasi publik melalui berbagai transformasi digital maupun kolaborasi integrasi, yang pada akhirnya dapat menghadirkan manfaat nyata demi kesejahteraan rakyat Indonesia sekarang dan masa depan,” tegas Siti.

KESETARAAN GENDER

Dalam beberapa tahun terakhir, tambah Siti, upaya menciptakan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan tidak hanya menjadi isu hangat, tetapi sudah dan akan terus direalisasikan. Hal ini terjadi karena kita semua menyadari bahwa dengan mendorong kesetaraan gender, dapat menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan.

“Dalam agenda global Sustainable Development Goals (SDGs), isu kesetaraan gender telah diklasifikasikan sebagai salah satu tujuan bersama, yaitu bertujuan membangun planet menjadi lebih baik, lebih setara, lebih aman, dan

lebih hijau hingga tahun 2030 mendatang,” tambahnya.

Saat ini, berbagai tren positif pun dapat kita saksikan, yang merupakan hasil dari perjuangan perempuan untuk setara dengan laki-laki. Salah satu buktinya yaitu porsi dan peran perempuan yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di dunia kerja. Mereka memiliki posisi penting sebagai pemangku kebijakan, hingga terjun ke lapangan untuk melestarikan lingkungan.

Hal ini, katanya didukung oleh sebagian besar masyarakat yang telah memberi ruang untuk kesetaraan gender. “Tugas kita adalah bagaimana perempuan dapat memanfaatkan kesempatan ini, untuk mengaktualisasikan diri dalam perannya masing-masing. Kesetaraan gender juga perlu didukung dengan kebijakan-kebijakan untuk memberdayakan perempuan dan peran serta seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkannya,” tegas Siti.

Dalam setiap strategi pembangunan, pengarusutamaan gender penting untuk menjadi prioritas. “Saya mencontohkan dalam bidang yang saya kerjakan

setiap hari di Kementerian LHK seperti pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kapasitas, khususnya terkait dalam peningkatan pengetahuan lingkungan merupakan suatu yang perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak. Dengan demikian, potensi sumber daya manusia yang begitu besar di Indonesia dapat berdaya guna tinggi bagi pembangunan yang ramah lingkungan,” sambungnya.

Bagi perempuan sendiri, Siti menyarankan untuk terus meningkatkan kapasitas diri. Seperti misalnya meningkatkan pengetahuan melalui kegiatan pemberdayaan yang dilakukan banyak pihak baik oleh pemerintah maupun swasta. “Harus dibarengi dengan memberikan akses pada kaum perempuan untuk ikut berpartisipasi, mengontrol dan mengambil keputusan dari sebuah pembangunan termasuk pembangunan lingkungan hidup. Pertanyaannya, dari mana mereka dapat meningkatkan kapasitas atau mempelajari keterampilan kalau tidak tersedia informasi yang benar. Maka dari itu, akses untuk mem-

peroleh informasi harus dibuka seluas-luasnya untuk semua pihak, termasuk juga untuk para perempuan,” sambung Siti.

“Dengan semua informasi yang didapat tersebut, harapannya para perempuan dapat meningkatkan pengetahuan dan kapasitasnya dalam bekerja. Sehingga akan diperoleh lingkungan hidup sehat, lestari dan layak huni, yang dapat dirasakan manfaatnya oleh perempuan dan seluruh umat manusia, termasuk generasi yang akan datang,” pungkas Siti. ■

“Dengan semua informasi yang didapat tersebut, harapannya para perempuan dapat meningkatkan pengetahuan dan kapasitasnya dalam bekerja.”



Menghadapi “Garangnya” Kaum Pekerja

Ida Fauziah, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, adalah salah satu contoh perempuan inspiratif yang kenyang makan asam garam, dari dunia aktivisme, politik praktis hingga menjadi birokrat puncak di lembaga pemerintahan sebagai menteri. Punya pengalaman panjang dalam dunia politik, sebagai anggota DPR mewakili Partai Kebangkitan Bangsa, mengantarnya menduduki kursi Menteri pada periode ke II pemerintahan Joko Widodo.

Ida menyadari, walaupun kedua posisi tersebut bekerja untuk rakyat, namun secara model tanggung jawab tentu saja berbeda. Sebagai anggota dewan tanggung jawabnya sangat kolektif kolegial dan bertanggung jawab terutama kepada rakyat di mana diwakilinya. Sebagai menteri kini Ida berperan secara eksekutorial melaksanakan semua keputusan politik termasuk dari DPR.

Sebagai menteri, Ida harus bertanggung jawab terhadap issue-issue ketenaga kerjaan yang tentu saja sangat kompleks. Mengurus sekitar 135 juta pekerja di seluruh Indonesia sangat tidak mudah, karena harus memikirkan penempatan kerja, keterampilan, jaminan perlindungan tenaga kerja dan kesejahteraannya termasuk bagaimana menciptakan hubungan yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja. Dan tak kalah pentingnya adalah memberikan kesempatan kerja yang sama bagi kaum disable serta mendorong UMKM menciptakan banyak tenaga kerja. “Tentu saja tanggung jawabnya lebih berat sebagai Menteri,” kata Ida. Ambisi Ida, tak muluk-muluk. “Saya akan menyelesaikan amanah sebagai Menteri ini dengan baik, dan siap untuk amanah selanjutnya,” kata Ida

Ida, mengakui mengurus masalah ketenaga kerjaan di Indonesia, penuh dengan tantangan. Selain bertanggung jawab langsung, dia harus memastikan issue-issue ketenaga kerjaan seperti hak-hak kaum buruh, menyeimbangkan relasi antara pekerja dan pemberi kerja dan yang penting lagi meningkatkan kapasitas tenaga kerja masa depan yang sesuai dengan tuntutan jaman. Seperti misalnya sewaktu ada protes kaum pekerja soal pencairan dana pensiun yang ramai beberapa waktu lalu, Ida harus tampil di depan menjelaskan protes, complain dari para pekerja. “Kami harus terdepan menghadapi dinamika seperti ini,” kata Ida.

Problem ketenagakerjaan di Indonesia sangat kompleks. Menurut Ida Fauziah selain jumlah tenaga kerja yang tidak terampil hingga kurang terampil yang masih mendominasi, selama kondisi Covid, kondisinya makin memburuk, karena terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Dan yang paling struktural tentu saja angka pengangguran yang masih tinggi. Selama pandemi, terjadi lonjakan PHK menjadi 7% atau setara 29 juta orang. Seiring pemulihan Covid, dan kembali bergerakannya ekonomi nasional, menurut catatan Badan Pusat Statistik, kini tinggal 5,83% atau sekitar tinggal 29 juta orang.



Sebuah angka yang “normal” seperti sebelum covid. Berbagai upaya dilakukan pemerintah, baik yang sifatnya “jangka pendek” maupun upaya structural lainnya terbukti efektif dan on the track.

Menurut Ida, pemerintah harus tetap berdiri netral di atas semua golongan, karena selain pekerja, pemerintah juga harus memikirkan kepentingan dunia usaha sebagai pemberi kerja. Karena itu harus memikirkan kepentingan tri partit secara seimbang yaitu pemerintah, pemberi kerja serta pekerja itu sendiri.

Menurut catatan Komisi Informasi Pusat (KI), sektor pariwisata paling menderita karena orang seperti berhenti berwisata. Terhadap sector ini telah banyak diberikan solusi khusus, terutama yang kehilangan pekerjaan. Salah satunya misalnya subsidi upah, sebesar Rp29 triliun di tahun 2020 kepada 12 juta pekerja untuk yang berupah di bawah Rp 5 juta. Program dilanjutkan di tahun 2021 menyasar pekerja bergaji di bawah Rp3 juta terutama yang berlokasi di Kawasan PPKM level 3 dan 4. Selain itu ada program padat karya

oleh kementerian perhubungan dan kementerian lainnya. Selain itu ada program kartu pra kerja. Semua program ini menurut Ida, cukup efektif untuk meredam dampak akibat Covid-19 selama dua tahun.

Ida memahami ketidakpuasan masyarakat atas “keterbatasan” pemerintah, namun di meyakini pemerintah sudah sangat serius bekerja untuk rakyat. Dana yang disediakan untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar kurang lebih 695 triliun seperti untuk pemulihan Kesehatan, subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) serta program responsive lainnya. Dengan harga migas yang tetap tinggi, dan belum pulihnya Covid, kementerian yang dipimpin oleh politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini akan menyediakan program bantalan untuk kurang lebih 8 juta orang pekerja.

Ida tidak hanya mendengar laporan asal ibu senang (AIS). Dia sendiri mengecek langsung ke lapangan, seperti ke Bali. Ternyata pekerja sangat merasakan manfaatnya. Untuk mendapatkan program kartu pekerja, seorang pekerja apa saja bisa mendapatnya termasuk pekerja sector informal. “Jadi dengan program ini kita melihat bahwa apa yang dilakukan pemerintah sudah optimal, dan menunjukkan bahwa pemerintah kita itu bersatu dan satu” kata Ida.

PEREMPUAN DAN INFORMASI

Ida yang telah menjadi anggota DPR selama 4 periode ini secara langsung atau tak langsung memberikan pengaruh struktural, yang telah menjadikan banyak perempuan tampil dan berperan besar dalam ruang publik termasuk berkuasa dalam pemerintahan. Produk politik seperti undang-undang telah melewati atau bisa menjembatani hambatan kultural yang mengungkung perempuan Indonesia untuk tampil di luar rumah.

Ida melihat, bahwa tingkat pendidikan dan kesejahteraan perempuan dan lelaki, berkorelasi positif terhadap kemampuan mengakses informasi. Statistik membuktikan, pekerja dengan pendidikan di bawah SMP lebih mendominasi pekerja di Indonesia. Demikian juga ada kesenjangan kesejahteraan antara laki-laki dan perempuan, di mana pria masih mendominasi dan tentu berpengaruh terhadap kemampuan mengakses informasi. “Dengan melihat fakta ini, bahwa cara efektif untuk mendorong perempuan aktif mengakses informasi yang bermanfaat, maka perempuan harus didorong untuk mengikuti pendidikan baik formal maupun informal,” kata Ida.

Kementerian yang dipimpin Ida, belum lama ini mendapat penghargaan dari KIP, kategori “INFORMATIF”. “Semoga ini menjadi model bagi Lembaga lainnya. Kami akan pertahankan status ini dan akan meningkatkannya di masa depan,” puji Ida.

AGENDA G20

Ida memastikan bahwa issue ketenaga kerjaan menjadi topik penting dalam pertemuan G-20 bulan November mendatang. Isu ketenaga kerjaan masuk dalam cluster Employment Working Group (EWG). Sebelum pertemuan pemimpin tinggi, bulan November, para menteri ketenaga kerjaan dari berbagai negara telah mengikuti berbagai serial

Dengan melihat fakta ini, bahwa cara efektif untuk mendorong perempuan aktif mengakses informasi yang bermanfaat, maka perempuan harus didorong untuk mengikuti pendidikan baik formal maupun informal,”

Ida Fauziyah,
Menteri Tenaga Kerja
Republik Indonesia

pertemuan hingga puncaknya bulan September 2022.

“Ada 4 issue yang kita angkat dalam G20, yang pertama yaitu penciptaan kerja yang berkelanjutan menuju perubahan dunia kerja, pasar tenaga kerja yang inklusif dan pekerjaan yang layak untuk penyandang disabilitas, serta perkembangan kapasitas manusia untuk pertumbuhan yang berkelanjutan untuk peningkatan produktivitas, dan yang terakhir menyesuaikan perlindungan tenaga kerja untuk perlindungan yang lebih efektif dan peningkatan ketahanan bagi semua pekerja. Dan empat isi ini yang akan kita bawa dalam presidensi G20 untuk isi ketenagakerjaan,” terang Ida.

Secara lebih detail, Ida menjelaskan bahwa penciptaan lapangan berkelanjutan, adalah bagian dari upaya menciptakan tatanan dunia baru. “Indonesia misalnya akan mendorong dan mempromosikan UMKM sebagai pelopor menciptakan lapangan kerja. Sektor UMKM akan didorong untuk lebih aktif memperbesar porsi penciptaan lapangan kerja.

Pemerintah juga mendorong prinsip inklusivisme dalam penciptaan lapangan kerja, di mana para penyandang disabilitas akan diberi peluang yang sama untuk mengakses lapangan kerja yang ada. Pengalaman Covid-19 juga



Terakhir tentu saja soal perlindungan tenaga kerja agar mereka punya hidup yang baik. Pengalaman pandemic Covid-19 menurut Ida memberikan banyak pelajaran penting bahwa perlindungan harus diberikan lebih adaptif.

memperlihatkan bagaimana kaum disable ini sangat terdampak akibat situasi yang terjadi. "Dibutuhkan aksi yang riil untuk para penyandang disabilitas agar lebih inklusif," kata Ida.

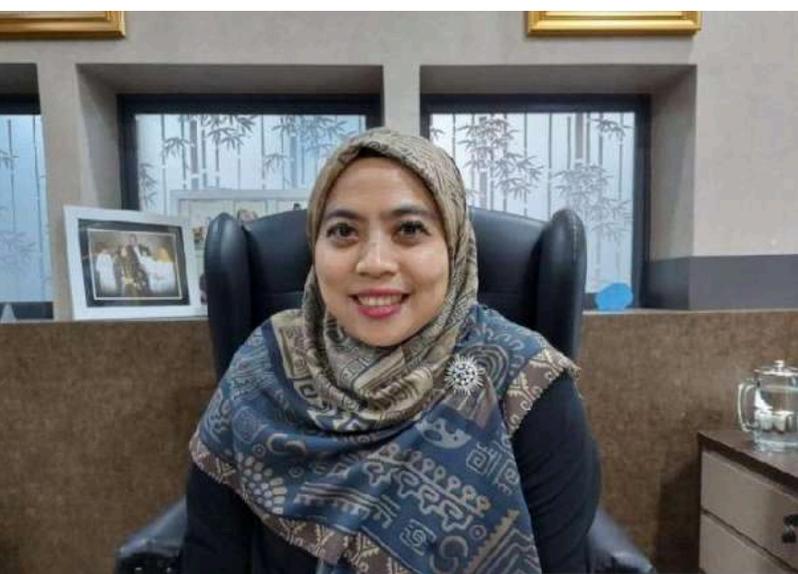
Bidang ketiga yang harus diputuskan bersama adalah meningkatkan kapasitas tenaga kerja. "Kita akan dorong agar nantinya akan diperbanyak pendirian Balai Latihan Kerja (BLK) di level komunitas. Pemerintah ingin mendorong agar BLK itu lebih dekat dengan masyarakat (community based training center). Dari 2127 BLK yang dipunya pemerintah, pemerintah akan meningkatkan kapasitasnya terutama yang berbasis keagamaan, serikat pekerja maupun berbasis sektor. Pelatihan ini termasuk misalnya mendukung pertumbuhan sektor

pariwisata yang makin berkembang. Selain tentu melakukan berbagai transformasi BLK dengan teknologi maupun perubahan pada kurikulum maupun model pelatihannya.

Terakhir tentu saja soal perlindungan tenaga kerja agar mereka punya hidup yang baik. Pengalaman pandemic Covid-19 menurut Ida memberikan banyak pelajaran penting bahwa perlindungan harus diberikan lebih adaptif. Ida melanjutkan bahwa ketidak pastian yang terjadi dalam lingkungan eksternal dan sangat cepat membutuhkan adaptasi dalam cara berpikir dan pilihan-pilihan kebijakan yang diambil. ■

Dorong Perempuan Tahu Haknya

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Betty Epsilon Idroos (43), optimistis bahwa partisipasi perempuan dalam perubahan demokrasi makin baik. Karena itu berbagai upaya dilakukan untuk terus mendorong perempuan agar terlibat aktif dalam politik agar mereka melek akan hak dan kewajiban mereka sebagai perempuan, ibu atau bagian penting dari negara.



Dia mengajak semua pihak baik itu pemerintah, termasuk Komisi Informasi agar perempuan lebih melek informasi dengan mengakses informasi yang berguna bagi kehidupan mereka sebagai individu maupun sebagai ibu misalnya.

KUALITAS INFORMASI LEBIH BAIK

Betty, telah malang melintang di praktek perpolitikan di tanah air. Bahkan Ketika masih menjadi mahasiswa di Institut Pertanian Bogor (IPB) dia sudah menjadi relawan menjadi pemantau pemilu di Kabupaten Bogor. Guna menambah pemahamannya dan pengetahuan tentang politik dan praktek politik, Betty melanjutkan Pendidikan paska sarjana di Universitas Indonesia di bidang Ilmu Politik. Karirnya sebagai pendamping dan aktivitas politik, dilanjutkan dengan menjadi pendampingan dan Pendidikan politik terutama bagi perempuan.

Aktivitasnya ini mengantarkan dia menjadi Ketua di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Jakarta 2018-2023. Perjalanan karir dan pengalaman dalam Pendidikan politik serta menjadi bagian penting

dalam praktek demokrasi mengantarnya menjadi pejabat di KPU pada tahun 2022.

Betty terpilih untuk lima tahun hingga 2027. Di pundaknya tugas berat siap diembannya, karena dia bertanggung jawab di bidang data dan informasi pemilu kepada public. "Kini KPU lebih baik. Dari berbagai parameter yang dipakai, seperti misalnya kelengkapan informasi mengenai pemilu serta akses publik terhadap informasi pemilihan umum, kami melihat warga masyarakat makin antusias untuk berpartisipasi," kata Betty. Salah satu contoh misalnya, masyarakat sudah sangat rajin mengakses informasi, tahapan pemilu atau memastikan partisipasinya sebagai pemilih dalam pesta demokrasi setiap lima tahun.

Di pundaknya, berbagai tugas penting diembannya. Misalnya memperbaiki semua kanal informasi yang bisa digunakan publik, seperti memperkuat website KPU, dan yang penting adalah tampilan informasi yang disajikan seperti informasi mengenai calon anggota legislative, calon kepala daerah hingga presiden, system logistic pemilu, rekapitulasi perhitungan suara dan lain sebagainya. "Yang penting publik harus aktif mencari tahu dan berinteraksi dengan petugas KPU.

Ke dalam, Betty mendorong stafnya untuk aktif dan responsive pada setiap keinginan warga untuk mencari tahu informasi apa saja mengenai pemilihan umum. Sistem informasi ini dibentuk hingga ke tingkat kabupaten, yang pekerjaannya dijalankan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). "Bahkan kita sudah membangun PPID secara digital, e-PPID yang dilengkapi dengan staf yang kapabel dengan dukungan system help desk yang mumpuni. "Semua informasi disajikan secara lengkap dan transparan, kecuali yang masuk kategori "kekecualian" karena berbagai pertimbangan," kata Betty.

POLITIK DAN PEREMPUAN

Secara kuantitatif partisipasi perempuan dalam politik menurutnya makin hari makin meningkat. Secara statistik, jumlah pemilih perempuan dan laki laki seimbang. Bahkan kebijakan afirmatif seperti jumlah keterwakilan politik perempuan dalam kepengurusan partai politik maupun di parlemen sangat mendorong partisipasi perempuan di

Indonesia. Walaupun misalnya antara harapan dan kenyataan masih sedikit “jomplang” namun terlihat angkanya semakin membaik. Di DPR pusat misalnya jumlah anggota DPR perempuan berjumlah 120 orang atau sekitar 20 % dari total 575 anggota. Banyak kepala daerah juga adalah perempuan dan sangat berprestasi di bidangnya.

Dari sisi hak pilih perempuan kini sudah makin aktif dan mandiri dalam menyalurkan aspirasi politiknya karena punya referensi terhadap partai politik maupun calon pemimpin daerah dan nasional yang bakal dipilinya. Berkat teknologi, seperti telpon seluler membuat peluang tersebut makin lebar. “Kalau perempuan tidak dilibatkan dalam proses pemilu, maka demokrasi akan pincang. Sebagai perempuan dan seorang ibu, melalui pemilu saya memperjuangkan aspirasi saya untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan misalnya,” kata Betty.

Kendati secara kuantitatif, perempuan punya hak yang setara dengan kaum pria, namun menurut mantan konsultan KPU ini, perempuan perlu diedukasi soal politik dan hak-hak yang mereka miliki. “Jika anda mengajar seorang pria, maka yang mendapatkan manfaatnya hanya seorang, tapi jika mendidik seorang perempuan maka semua anak-anaknya dengan sendirinya akan terdidik. Mengajar seorang perempuan adalah mengajar sebuah generasi,” kata Betty.

WANITA DAN INFORMASI

Betty sepakat bahwa salah satu masalah yang dihadapi perempuan dewasa ini adalah, akses terhadap informasi yang rendah. Untuk atasi gap ini, perempuan diminta untuk aktif. Pertama katanya perempuan harus punya sikap mental “saya ingin tahu” berbagai informasi misalnya soal pendidikan, kesehatan, lingkungan dan politik. Dengan penyebaran mobile phone perempuan bisa cari tau banyak hal misalnya info soal sekolah, kualitas, kurikulum, arah kebijakan. Dia mengakui tidak semua perempuan punya akses merata akan informasi. “Makanya perlu pendampingan



“Kalau perempuan tidak dilibatkan dalam proses pemilu, maka demokrasi akan pincang.”

Betty Epsilon Idroos, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat

misalnya untuk cari akses informasi apa saja, yang benar dan relevan” kata Betty.

Yang kedua, perempuan harus punya kemauan, dan mau tahu tentang apa saja terutama berkenaan dengan hak mereka sebagai perempuan. Harus diakui katanya ketimpangan pembangunan wilayah membuat akses atas informasi tidak merata.

Kendati masih banyak informasi di lapangan, Betty menilai kualitas keterbukaan informasi publik, termasuk issue perempuan makin hari makin baik. Dia bahkan berani memberi nilai 8,5 dari skala 1-10. Karena itu dia mengapresiasi atas inisiatif yang dilakukan oleh Komisi Informasi yang mendorong keterbukaan informasi pada Lembaga publik misalnya melalui pengumuman Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang diadakan setiap tahun. Dengan ini mendorong lebih kuat kepada Lembaga publik untuk menyajikan informasi yang relevan kepada perempuan tentang hak dan kewajiban mereka sebagai perempuan, ibu dan

pendidik.

Betty telah memberikan inspirasi kepada perempuan Indonesia, bahwa mereka bisa menjadi hebat dalam segala hal termasuk dalam bidang politik, menjadi pemimpin local maupun nasional. Perempuan kata dia punya kodrat yang hakiki yang bisa memberikan banyak perubahan pada sebuah generasi.

Kebijakan afirmatif yang memberikan peluang perempuan duduk di legislative adalah cara negara untuk membuka akses bagi mereka untuk terlibat dalam jabatan publik dan ikut serta memikirkan dan memutuskan masalah kebangsaan.

Betty adalah satu dari sekian perempuan inspiratif yang gigih berjuang di jalur public, memperjuangkan demokrasi, system pemerintahan yang transparan, terbuka dan tentu saja secara tak langsung berperan mendorong perempuan Indonesia untuk banyak aktif dan terlibat memperjuangkan hak sebagai perempuan maupun sebagai ibu. ■



Dapur Koordinasi Reformasi Birokrasi

Jaleswari Pramodhawardhani, menjadi salah satu tokoh sentral dalam implementasi program pemerintah di bidang reformasi birokrasi, lobby lobby politik tingkat tinggi dalam perumusan undang-undang. Dia menjadi kunci penting di balik kerja-kerja teknokrasi di balik layar memuluskan berbagai issue dan koordinasi di bidang politik, hukum yang jadi perhatian publik.

Jaleswari Pramodhawardhani, atau akrab dipanggil Dhani, sudah malang melintang dalam dunia akademis, birokrasi, politik dan aktivisme. Sumbangsihnya dalam pemerintahan sudah tak diragukan lagi. Mantan peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan sekarang telah bergabung dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kini menduduki jabatan penting sebagai Deputy V, di Kantor Staf Presiden (KSP) membidangi hukum, politik, reformasi birokrasi, Otonomi Papua. Termasuk di dalamnya memperkuat implementasi prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik sebagai bagian penting dalam proses demokrasi di Indonesia, secara khusus memangkas hambatan (bottleneck) rencana program prioritas pemerintah.

Dhani telah membantu pemerintah, sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang waktu itu disebut *Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan UKP4P* tugas yang kurang lebih mirip dengan apa yang dikerjakan KSP sekarang ini yakni mengawasi program prioritas presiden Joko Widodo. Dengan fungsi ini, Dhani banyak terlibat dalam proses koordinasi antara departemen/lembaga negara agar program presiden bisa segera terwujud termasuk mengatasi berbagai sumbatan yang bisa memperlambat implementasi program.

Dengan kedudukan yang strategis tersebut, Dhani melihat bahwa wanita Indonesia dewasa ini bersyukur karena rejim demokrasi memungkinkan dia bisa terlibat aktif dalam urusan publik. Kendati kodrat wanita tak tergantikan, namun peluang wanita untuk lebih banyak terlibat dalam urusan publik sebagai buah dari demokrasi terlepas dari kekurangannya. Ketika misalnya beberapa waktu terjadi protes publik atas karena pemerintah mengontol Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), Dhani harus bisa menggalang koordinasi antara instansi yang menangani issue tersebut. "Publik hanya melihat tindakan pemerintah menutup beberapa situs yang populer. Yang kurang dilihat masyarakat adalah pemerintah punya gagasan besar untuk membangun kedaulatan digital, yang menjadi sangat penting demi keamanan warga di ruang digital, seperti perlindungan data pribadi," kata Dhani.

Di sela-sela kesibukannya sebagai birokrat, Dhani menerima majalah "BUKA" serta komisioner KIP, Arya Sandhiyudha, Rospita Vici Paulyn, Gede Narayana di kantornya di Istana Negara beberapa waktu lalu mendiskusikan berbagai hal termasuk hambatan struktural, politis dalam penerapan keterbukaan informasi publik serta partisipasi perempuan.

Berikut cuplikan wawancara yang dilakukan di kantornya.

BUKA (B): Sebagai perempuan Indonesia yg memiliki pengaruh dan memberi banyak inspirasi bagi para perempuan di Indonesia, apa harapan Ibu bagi perempuan Indonesia?

Dhani (D): Saya berharap perempuan Indonesia lintas generasi, untuk dapat makin berperan dalam banyak bidang kehidupan masyarakat. Termasuk hal-hal yang menyangkut dengan (kepentingan)

Saya mendorong perempuan Indonesia yang tangguh, dinamis, dan mampu menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks.

Jaleswari Pramodhawardhani

Deputy V, di Kantor Staf Presiden (KSP)

dirinya serta permasalahan publik di sekitarnya. Aktif dalam perbincangan isu publik, dan berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Saya mendorong perempuan Indonesia yang tangguh, dinamis, dan mampu menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks.

Perempuan Indonesia mesti turut serta dalam kerja membangun peradaban Indonesia yang unggul. Oleh karena itu, kita harus dukung kebijakan pemerintah yang semakin berpihak kepada kelompok marginal, salah satunya kelompok perempuan. Kebijakan pembangunan yang melibatkan perempuan inilah yang menjadi pintu masuk partisipasi perempuan dalam turut serta merespons tantangan zaman.

Saat ini sudah ada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan-badan publik. Menurut pendapat ibu, sudah seberapa jauh keterbukaan di Indonesia sehingga masyarakat khususnya perempuan bisa mendapatkan berbagai informasi secara baik dan benar?



Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah menjamin komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, bersih, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semua kalangan, termasuk di dalamnya perempuan, dapat mengetahui kegiatan dan program apa saja yang sedang dilakukan oleh kementerian dan lembaga. Undang-undang ini memberikan jaminan tentang bagaimana cara meminta informasi dan bagaimana jika informasinya ditolak. UU ini juga memberikan batasan tentang definisi informasi yang harus disediakan, dan tidak lagi tergolong rahasia.

Kita tahu arus informasi bergulir begitu cepat, seiring dengan kemajuan teknologi. Perempuan semakin mudah mengakses informasi melalui ragam media yang dapat dibuka dalam satu genggaman. Ketersediaan informasi dan komunikasi, serta kebebasan dalam berekspresi sekarang ini, adalah peluang besar untuk berpartisipasi dalam masyarakat.

Menurut Survei Indeks Literasi Digital Nasional 2021, persentase perempuan yang menggunakan internet sebesar 56,6%, lebih tinggi daripada laki-laki sebesar 43,4%. Angka tersebut menunjukkan bahwa perempuan Indonesia telah memiliki akses ke teknologi dan saat ini sedang bermigrasi dan bertransformasi secara digital.

Disisi lain, Skor Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Indonesia tercatat sebesar 74,43 pada tahun 2022, meningkat 3,06 poin, dari 71,37 pada 2021. Skor yang masuk dalam kategori "sedang" itu menjadi tantangan bagi lintas sektor dan lembaga untuk bergerak ke arah yang lebih baik, yang lebih transparan dan accountable.

B: Terhadap adanya jaminan hak akses atas informasi, menurut ibu apa peran Perempuan Indonesia bagi keterbukaan informasi publik di Indonesia?



Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu upaya percepatan reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah. Tidak ada lagi sekat informasi dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik. Perempuan sebagai agen perubahan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung implementasi keterbukaan informasi publik. Peralannya, dengan meningkatnya literasi digital perempuan, diiringi kesadaran untuk mengakses informasi publik, maka representasi dan partisipasi perempuan terus meningkat.

Akses informasi yang luas, komunikasi yang mudah, serta pengetahuan tentang kelembagaan dan isu publik, membawa kesempatan luas perempuan untuk berkembang. Contohnya, perempuan yang melek teknologi, dan paham tentang informasi publik, suatu saat dapat mengakses pelatihan-pelatihan wirausaha dalam jaringan (daring) dari swasta maupun pemerintah. Mereka dapat mengembangkan potensinya sekaligus membaca peluang mengembangkan badan usahanya menjadi legal mengikuti langkah-langkah yang ada di

Perempuan yang melek teknologi, dan paham tentang informasi publik, suatu saat dapat mengakses pelatihan-pelatihan wirausaha dalam jaringan (daring) dari swasta maupun pemerintah. Mereka dapat mengembangkan potensinya sekaligus membaca peluang mengembangkan badan usahanya menjadi legal.

situs pemerintah untuk mendaftarkan badan usahanya menjadi legal. Nah, transformasi digital yang inklusif, memberdayakan, dan terus berkelanjutan inilah yang akan mengurangi angka ketimpangan gender dalam masyarakat.

Hal apa yg perlu ditingkatkan lagi dalam perjalanan keterbukaan informasi publik di Indonesia?

Ruang digital yang aman, inklusif, dan membawa perubahan yang baik, memerlukan kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak. Kesadaran tentang kewajiban pemerintah, dalam hal ini kementerian dan lembaga, dalam memberikan informasi kepada publik, harus dimaknai sebagai komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, dan partisipatif merupakan ciri negara demokratis yang kuat.

Adalah penting untuk meningkatkan literasi digital bagi seluruh lapisan masyarakat, antar generasi, sebagai bekal pengetahuan yang mumpuni di tengah “tsunami” informasi. Kemampuan masyarakat untuk memilah mana informasi yang terpercaya, kredibel dan dapat dipertanggung jawabkan dan mana informasi simpang siur, atau bahkan hoax, akan menentukan respon publik atas suatu kebijakan. Membanjirnya hoax, di ruang digital, tentu bukan perkara yang mudah, tapi bukan berarti tidak dapat ditangani. Perlu kerja sama yang baik antara pemerintah, elemen masyarakat, dan juga swasta untuk memanfaatkan ruang digital yang aman dan nyaman.

Apa komitmen yg akan Ibu lakukan utk kemajuan keterbukaan informasi publik di Indonesia?

Sebagai upaya dan komitmen dalam memajukan keterbukaan informasi publik, konsistensi dalam menyediakan informasi yang akurat, transparan dan akuntabel menjadi hal yang utama.

Dalam lingkungan pekerjaan,

“Publik hanya melihat tindakan pemerintah menutup beberapa situs yang populer. Yang kurang dilihat masyarakat adalah pemerintah punya gagasan besar untuk membangun kedaulatan digital, yang menjadi sang-at penting demi keamanan warga di ruang digital, seperti perlindungan data pribadi,”

saya selalu menekankan bahwa penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa yang sedang dilakukan. Mengapa? Karena pertama, masyarakat berhak tahu sebenarnya bagaimana pemerintah bekerja melaksanakan tugas sebagai pelaksana kebijakan. Kedua, keterbukaan informasi publik sebenarnya memudahkan pekerjaan, dan bahkan mempercepat reformasi birokrasi. Fungsi Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai lembaga yang memberikan dukungan percepatan pelaksanaan, monitor dan evaluasi program prioritas nasional dan isu strategis, diuntungkan dalam keterbukaan informasi publik. Sehingga, kami dapat mengetahui secara cepat, di mana bottleneck yang menghambat implementasi program prioritas nasional. Setelah mengetahui hambatan, kita dapat secara langsung berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah secara komprehensif.

Apa pesan yg ingin Ibu sampaikan agar Perempuan Indonesia semakin menunjukkan eksistensinya melalui Haknya atas informasi?

Negara menjamin atas hak kon-

stitusional warga negaranya dalam memperoleh informasi. Termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 F, bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Perempuan merupakan sumber informasi dan pendidik di lingkungan terkecil yakni keluarga. Maka, peran perempuan menjadi sangat penting dan krusial terutama dalam hal literasi. Tetap menjadi perempuan yang andal di segala kondisi yang situasional. Mari jadikan momen ini (momen keterbukaan informasi) sebagai peluang bagi kita, perempuan Indonesia, yang berdaya dan selalu ingin tahu dan terlibat, dan selalu sadar terhadap peran sosial yang kita emban. Tidak melulu menunggu informasi itu hadir, sebenarnya kita berhak pula untuk menanyakan informasi yang bersifat publik. ■

Menerobos Batas Kultural Perempuan

Politisi, dan pengamat intelijen Dr Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati, sangat lantang ketika bicara kualitas politisi yang mewakili rakyat, terutama dari kaum perempuan. Dalam pandangannya, mestinya perempuan harus bisa memanfaatkan momentum keberpihakan yang afirmatif, untuk menunjukkan dirinya bahwa dia benar-benar setara dengan lelaki dalam soal kualitas fungsinya sebagai wakil rakyat dan kedudukannya setara dengan pemerintah.



Karena itu dia meminta lembaga berwenang seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus bisa membuat aturan main yang ketat yang mengikat semua partai politik untuk tundak. Misalnya dia menyarankan agar menghindari sejauh mungkin calon legislatif hanya bermodal popularitas, karena dunia politik bukanlah dunia sinetron yang lakonnya bisa direkayasa. "Memang bisa dipahami pragmatisme partai politik juga menjadi penghambat mencuatnya gagasan ini,"katanya

Setelah tak lagi menjabat anggota DPR mewakili Partai Hanura, pada tahun 2009-2014, Susaningtyas mendalami bidang intelijen yang mengantarkannya punya pandangan yang makin luas dalam melihat segala sesuatu termasuk soal peran perempuan dalam hidup bernegara. .

Dosen mata kuliah Perang Asimetris, di Universitas Pertahanan ini getol sekali kalau bicara kualitas lembaga negara terutama yang terbentuk pasca reformasi seperti komisi-komisi yang menangani issue-issue tertentu seperti perempuan, hak asasi manusia, maupun informasi publik.

Untuk KOMNAS HAM, misalnya dia menyoroti agar dalam membela hak asasi manusia agar lebih inklusif , tanpa memandang ikatan primordialisme dari korban. Demikian juga mengenai peran KOMNAS Perempuan yang menurutnya harus diperkaya sehingga misalnya tidak hanya mengadvokasi soal kekerasan dalam rumah tangga. "Misalnya Komnas Perempuan harus memperluas tugasnya, mengenai pemberdayaan perempuan dalam menangkal issue global seperti intoleransi, polarisasi kekuatan global serta issue-issue geo strategis lainnya," kata penasihat bisnis untuk beberapa kelompok usaha ini.

TEROBOS HAMBATAN BUDAYA

Putri pejuang, era Presiden Soekarno ini sangat teguh membela nasionalisme dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kodratnya sebagai perempuan membuat dirinya tetap mengikuti masalah-masalah perempuan. Kendati misalnya ada hambatan kultural yang membuat perempuan di beberapa tempat terhambat untuk mengungkapkan kepentingannya, namun dia melihat pendidikan yang baik akan membantu perempuan Indonesia bisa memperjuangkan kepentingannya baik sebagai perempuan, maupun sebagai ibu rumah tangga. "Di Jawa misalnya adalah tabu alias ora ilok, jika wanita terlalu lantang bersuara. Kendala ini harus diatasi bersama melalui pendidikan yang baik demi memperjuangkan hak-haknya,"kata Susaningtyas.

Dengan ini pula , ketika dia menjadi anggota dewan perempuan akan menjadi pembeda yang bisa berbicara mengenai bidang yang ditanganinya secara bertanggung jawab dan berbobot. "Misalnya ketika rapat dengan mitra pemerintah , perempuan yang berkualitas akan bisa bersaing dalam gagasan, atau setidaknya tidak gagap ketika mengisi daftar inventaris masalah (DIM) sehingga tidak hanya mengandalkan staf ahli untuk memberikan



Perempuan yang berkualitas akan bisa bersaing dalam gagasan, atau setidaknya tidak gagap ketika mengisi daftar inventaris masalah (DIM) sehingga tidak hanya mengandalkan staf ahli untuk memberikan masukan.

Dr. Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati

masukan," katanya. Perempuan, menurutnya harus bisa bersaing secara sehat dengan jalan yang benar dan etis.

Wanita Indonesia kini di lapisan atas memang sudah sangat bersaing, dari sisi pendidikan maupun kualitas lainnya, tapi persoalan ada pada wanita kelas menengah kebawah. Akses pada informasi misalnya soal gizi, pendidikan informal, pendidikan sangat terbatas. Kalaupun ada akses karena teknologi perempuan diharapkan untuk mampu menyaring informasi dengan baik dengan dukungan literasi media sosial yang mumpuni. "Setidaknya mereka bisa memperjuangkan hak-haknya,"kata Susaningtyas.

Dia yakin sekali hanya dengan pendidikan yang



baik, kualitas perempuan akan bertambah baik termasuk kemampuan mengakses informasi. Didukung oleh literasi yang baik, perempuan justru punya peran yang sangat strategis dalam membina mental setidaknya dimulai dari keluarganya sendiri untuk bisa mendidik anak-anaknya agar lebih inklusif, berwawasan terbuka serta mencegah ekstrimisme dan radikalisme cara berpikir. Banyak keluarga yang mengajarkan pendidikan agama kurang benar, menyebabkan anak-anaknya menjadi radikal dan tertutup,” tegas Susaningtyas. Sedangkan pada perempuan kalangan atas perempuan untuk terus membekali dirinya dengan ilmu dan informasi mutakhir agar paham trend geopolitik global seperti multikulturalisme, unilateral versus multilateral atau issue-issue

mutakhir lainnya.

Doktor ilmu komunikasi lulusan Universitas Padjajaran ini sangat yakin sekali pengayaan pada lembaga advokasi perempuan atau yang langsung pada perempuan akan menghasilkan wanita yang paham akan lingkungan strategis, trend global serta tantangan dunia masa kini.

Politisi senior ini adalah produk era reformasi yang memberikan kesempatan secara terbuka kepada setiap orang dalam urusan kenegaraan. Menjadi anggota DPR dilaluinya sejak tahun 2009-2004, kemudian maju lagi 5 tahun setelahnya. Dari tangannya dilahirkan beberapa produk perundang-undangan yang masih dipakai hingga kini.

Demikian juga issue mutakhir lainya soal stunting misalnya. Wanita harus paham bahwa gizi

seorang anak itu dimulai dari dalam kandungan, karena itu pendidikan pra nikah perlu diberikan pada perempuan calon ibu rumah tangga. Di luar peran sebagai ibu, wanita diharapkan aktif dalam kegiatan lain yang lebih bermanfaat.

Susaningtyas termasuk pemberani. Ketika kasus penembakan oleh Irjen Ferdy Sambo ada gejala ditutup-tutupi pada awalnya, dia sudah berteriak agar proses penyidikannya jangan ditutup-tutupi. Gayung Pun bersambut, bagai “koor” berbagai lapisan masyarakat turut mendorong agar penyidikan dilakukan secara terbuka. Indikasi “kejanggalaan” dalam kasus ini sudah dirasakan Susaningtyas. Karena kelantangannya ini, banyak menduga ada kekuatan besar berdiri di belakangnya.

Padahal dia berbicara dari hati nurani serta melihat keanehan berdasarkan akal sehat. Dengan semakin transparan proses penyidikan dia yakin akan mencegah distorsi dan disinformasi publik yang justru menimbulkan kekacauan. Untuk itu dia setuju ketika KAPOLRI mengumumkan temuan penting berdasarkan crime scene investigation (CSI) yang berdasarkan metode-metode ilmiah.

Dia berharap agar semua pihak terlibat dalam literasi kepada perempuan. Dalam hal penggunaan social media misalnya kementerian komunikasi dan informasi (KOMINFO) harus berperan dalam literasi digital bagi masyarakat.

Dia melihat masih banyak tantangan dalam implementasi keterbukaan informasi sesuai amanat undang undang No 14 tahun 2008 itu. Selain secara kelembagaan belum banyak dikenal publik, secara struktural, Komisi Informasi (KI) masih terbatas wewenangnya karena mereka hanya menunggu aduan

dari publik atas kinerja lembaga yang kurang terbuka atas informasi publik. Dari lahirnya dia melihat persiapan pembentukan undang-undang ini kurang matang, termasuk misalnya irisan fungsinya dengan lembaga negara lain seperti TNI atau POLRI. Dari kasus "Sambo" misalnya mestinya KI harus berada di barisan terdepan mendesak pihak terkait agar membuka secara transparan penanganan kasus ini. Namun faktanya justru KOMNAS HAM yang porsinya kecil menjadi lembaga yang paling banyak berperan.

Namun dia melihat makin hari, sudah banyak yang mengenal eksistensi KIP dan perannya dalam mendorong keterbukaan informasi yang memang harus memenuhi hak publik untuk mengetahui informasi (right to know) sambil berharap ada inisiatif untuk mengamandemen undang-undang ini agar. Secara komunikasi, KIP diharapkan untuk banyak menggalang kerja sama dengan lembaga lain seperti universitas, media masa supaya makin terlihat perannya bagi penguatan demokrasi. ■

Wanita harus paham bahwa gisi seorang anak itu dimulai dari dalam kandungan, karena itu pendidikan pra nikah perlu diberikan pada perempuan calon ibu rumah tangga. Di luar peran sebagai ibu, wanita diharapkan aktif dalam kegiatan lain yang lebih bermanfaat.



Komisi Informasi Harus Diperkuat

Rachel Maryam mendorong agar Komisi Informasi diberi peran yang lebih kuat dengan dukungan anggaran yang memadai. Dan bila perlu ada amandemen undang-undang agar kehadirannya lebih terasa di alam demokrasi.

Sebagai artis peran, Rachel Maryam (42) sudah membintangi setidaknya 13 film layar lebar. Sebagai anggota parlemen perempuan kelahiran Bandung ini, sudah duduk di kursi DPR mewakili Partai Gerindra, daerah pemilihan, Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, hampir 13 tahun. Secara perlahan, dunia artis ditinggalkannya. Hanya focus urus politik. Diawal duduk di kursi panas DPR, artis peran ini masih sempat membintangi kurang lebih tiga film antara lain film “Sepuluh” produksi First Media, Garapan sutradara Henry Riady serta menyutradari sebuah film pendek “Rectoverso” bersama rekan artisnya.

Demokrasi telah mentransformasi Rachel dari dunia peran ke dunia politik yang katanya lebih serius dan urusan lelaki. Dia jujur mengakui popularitasnya turut serta mengantarkan dirinya menjadi seorang politisi di Senayan.

“Menjadi seorang wakil rakyat tidak, yang paling utama dibutuhkan adalah kepekaan terhadap segala situasi yang dialami rakyat, dan punya hati untuk bekerja dengan baik,”katanya. Karena itu, kendati seorang DPR harus punya kualitas yang baik terutama pengetahuan akan bidang-bidang yang menjadi tanggung jawabnya di DPR, namun Rachel percaya bahwa sense terhadap kepentingan rakyat dan terutama konstituennya lebih utama dari pada sekedar pengetahuan misalnya teori tentang politik atau hukum.

Menjabat sejak jumlah anggota DPR dari Gerindra hanya 26 kursi dan sekarang berjumlah 78, Rachel mengakui banyak pelajaran yang diperolehnya. Terutama tentang praktek politik dan membantu para konstituennya memahami politik secara positif. Ketika anggapan publik bahwa politik itu “kotor” atau hanya “urusan lelaki” Rachel justru mengubah pandangan itu dengan cara yang nyata.

Di daerah yang diwakilinya dia justru banyak mempercayakan perempuan dan kalangan muda untuk menjadi ujung tombak mencari dukungan suara selama pemilihan. Proses edukasi, di luar pemilu sering dilakukan baik soal politik dan demokrasi.

PEREMPUAN, DEMOKRASI DAN KETERBUKAAN

Walaupun sudah puas dengan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen, Rachel punya impian besar



agar kelak para perempuan ini bisa menduduki kursi kepemimpinan yang sekarang didominasi kaum lelaki. “Perempuan di parlemen sudah mulai dirasakan kehadirannya, namun belum mendapat peran yang signifikan dalam setiap alat kelengkapan dewan,” aku ibu 2 orang anak ini.

Dia mengakui, awal menjadi anggota dewan cukup “minder” karena bukan berasal dari politisi karir atau aktivis. Bahkan artis itu sering dianggap miring bahkan dianggap seperti badut pelengkap pentas politik. Seiring waktu hambatan psikologis tersebut bisa diatasinya dengan terus belajar melengkapinya dengan pengetahuan politik dan hukum.

Bahkan dia berani bertaruh, “Yang dibutuhkan DPR adalah niat baik, tidak hanya paham hukum. Sebagai anggota dewan, mereka bekerja dengan supporting system, yang memadai, seperti para tenaga ahli. Yang utama niat kita, pikiran kita harus baik. Yang dibutuhkan adalah niat baik,” tegas kata Rachel.

Ibu dua orang anak ini yakin sekali, bahwa peran Komisi Informasi (KI) sangat strategis karena itu perlu dukungan dari berbagai kalangan termasuk DPR dengan misalnya menambah jumlah anggaran.



Secara prestasi, Rachel harus jujur mengakui bahwa peran KI sudah cukup signifikan. "Harus berlari lebih cepat, dan menyelesaikan kasus-kasus dengan baik,"katanya.

Mengenai akses perempuan pada informasi dia bahkan melihat sudah sangat "unlimited" "Pertanyaan adalah apakah mereka sudah mengakses informasi yang berguna atau malah yang merusak diri mereka sendiri," katanya. Tentu situasi berbeda ketika bicara mengenai daerah 3 T (tertinggal, terdepan dan terluar) karena saat ini baru pada upaya pemenuhan fasilitas dasar. " Untuk para konstituennya, dia selalu mendorong kaum perempuan untuk gunakan gadget lebih produktif.

Dari sisi konten, dia berharap perempuan juga menjadi pelopor dalam hidup bermasyarakat menyebarkan sikap hidup toleran, kasih sayang kepada anggota masyarakat lain. Hanya ada syaratnya yakni pertama perempuan harus pertama kali mendapat kasih sayang dari suaminya, baru dia bisa menularkan sikap yang sama kepada anak-anaknya atau masyarakat pada umumnya. Demikian juga dengan semangat

toleransi, sikap moderasi dalam beragama dan berpandangan.

Untuk perempuan di daerah 3 T, perlu ada upaya ekstra, selain membangun sarana fisik, dan yang paling penting edukasi dan kerja sama antara stake holder, antar daerah agar bisa menyikapi derasnya informasi secara lebih sehat dan dimanfaatkan untuk kebaikan masyarakat itu sendiri.

Menurut Rachel, tidak ada solusi yang tunggal dan paling ampuh untuk pertama meningkatkan literasi bagi perempuan terhadap derasnya informasi. Dengan literasi yang baik, maka perempuan pertama informasinya diperkaya dan wawasan dan pengetahuan mereka bertambah dan yang penting mendorong bagaimana memanfaatkan informasi tersebut bagi kepentingan keluarganya. Dia berharap agar semua pihak bekerja sama untuk mengelola banjirnya informasi ini dengan baik.

PERKUAT KI

Rachel sangat mendukung peran KI agar lebih diperkuat lagi. Bahkan dia mendorong jika karena undang-undang dan peraturan menjadi tantangan dalam penguatan peran tersebut, maka sebaiknya segera diubah

undang-undangnya.

Sebagai politisi Rachel akan berbuat semaksimal mungkin agar peran KI bisa diperluas.. Selain terus memberikan motivasi pada para komisioner maupun staf KI, Rachel akan menjadi salah satu anggota yang kuat mendukung penguatan kelembagaan KI, dengan tetap tunduk pada hukum yang berlaku.

Bahkan dia sendiri, termasuk yang mendukung agar KI diberi wewenang tambahan sesuai amanat UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sudah disahkan DPR belum lama ini. Dia pun setuju misalnya KI dibentuk dalam sistim "dua kamar" seperti yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) di mana ada kamar perdata, agama, militer dan lain sebagainya. Dengan memberi peran yang lebih, maka perbedaan persepsi mengenai informasi apa yang boleh dibuka dan ditutup jadi pasti.

Sebagai informasi, beberapa kalangan termasuk anggota DPR sudah mendorong agar peran ini diberikan pada KI, namun harus ada kesepakatan antara DPR dan pemerintah. "Namun pertanyaan apakah KI bisa menjalankan perannya, harus tahu kemampuan juga,"kata Rachel. ■

Bersuara Lantang Lewat “Suara Niluh”

Niluh Djelantik menempuh jalannya sendiri mendorong keterbukaan informasi lembaga publik, serta menampung aspirasi masyarakat di sekitarnya melalui rumah aspirasi “Suara Niluh”.

Niluh (47) adalah seorang aktivis, politisi, pengusaha dan pejuang kemanusiaan. Pernah punya label sendiri Nilou, kemudian Niluh Djelantik. Dia dibentuk waktu dan jaman sejak kecil. Ditinggal cerai sang ayah pada umur 1 tahun, Niluh, belajar pentingnya perjuangan, ketekunan, keadilan, objektivitas, kejujuran, keberanian. Semua itu ditimba dari ibu yang sangat tangguh dan kuat dan menjadi role modelnya.

Hidup dalam keterbatasan membuat Niluh jadi hebat bahkan sebelum apa yang diperjuangkannya dan dicapai sekarang ini. Dia pembelajar, bahkan sebelum masuk pendidikan formal. Kini dia mendirikan “Suara Niluh” sebuah rumah aspirasi sejati, tempat orang-orang kebanyakan menyuarakan masalah, kepentingan, keluhannya kepada pihak pemerintah. Dia menjadi saluran rakyat sejati. Sebuah fungsi yang mestinya dijalankan oleh anggota DPR/D misalnya.

Karena perjuangannya ini, Niluh sering berurusan dengan pihak keamanan. Aparat yang melihat kesejatan perjuangan ibu dari seorang putri ini, tak bisa berbuat apa-apa karena apa yang dilakukan memperjuangkan suara rakyat sesungguhnya (voice of powerless).

Sebagai pengusaha, Niluh bukan pengusaha kaleng-kaleng alias pemain lokal. Produknya sudah menembus pasar dunia, bahkan hingga ke jantung gaya hidup fashion (lifestyle) dunia seperti New York, Paris atau London.

Karakternya yang gemar speak up, apa adanya menular ke orang-orang sekitarnya. Dari sekedar mendengar curhat ibu-ibu yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, “paksaan” agar mereka tinggal di rumah saja, pemilik tanah yang tercabut dari tanah miliknya, birokrasi perijinan, hingga keluhan pada investor abal-abal yang serampangan memporakporandakan Bali, bahkan keluhan tertutupnya informasi profil seorang politisi membuat Niluh bertekad; “saya harus menjadi saluran aspirasi mereka, dan berdiri di antara pengeluh dan pejabat”.

Karena itu, ibunda dari Niluh Putu Ines Saraswati Djelantik pernah menjadi politisi di Partai Nasdem, namun kemudian mundur, karena alasan perbedaan pandangan. Di awal perjuangannya, banyak sahabat menentang dan lebih baik fokus pada bisnis. Namun suara hati, pengusaha fashion berkelas ini “keukeuh” dan pada akhirnya berbalik mendukung.

Niluh tidak pernah puas dengan pencapaian material. “Bagi saya hidup itu pilihan, dan terus mencari keseimbangan dalam hidup. Jika sudah selesai dengan



diri sendiri mari kita memperjuangkan kebaikan bagi sesama,” katanya tegas.

Sebagai politisi Niluh memperhatikan dengan seksama praktek demokrasi di lapangan termasuk transparansi publik. Sebagian katanya sudah baik dan memadai.

Soal keterbukaan informasi, Niluh melihat banyak kemajuan. Namun masih banyak informasi yang mestinya jadi hak masyarakat, aksesnya masih terbatas. Jadi keterbukaan informasi itu harus dilihat dari perspektif masyarakat. “ Saya berharap agar semua pemerintah daerah dan kementerian

menyajikan informasi yang dibutuhkan publik, termasuk misalnya penggunaan dana oleh seorang politisi, apa yang diperjuangkan, bagaimana alur kerja birokrasi, kemampuan artikulasi kepentingan dan lain sebagainya,” katanya.

Ni Luh sadar ada informasi kategori “rahasia” karena alasan keamanan negara. Akan tetapi transparansi seorang pejabat, jumlah dana yang digunakan, apa saja yang dilakukan seorang politisi, prestasi, pendapatan pejabat publik, kemampuan menyalurkan aspirasi perlu diketahui masyarakat.

Yang perlu ditingkatkan adalah kemudahan mengakses informasi dan sejauh mana rakyat bisa berinteraksi langsung dengan wakil, atau pemimpinnya. Sebagai tokoh masyarakat, perempuan pengusaha gaya hidup perempuan ini sudah menjadikan rumahnya sebagai “tempat aduan” masyarakat. Ada-ada saja informasi yang ditampungnya mulai dari soal kesetaraan gender, kekerasan seksual, hak-hak warga atas tanah yang dihuninya, gempuran investor asing yang dilihatnya ilegal pada kawasan wisata di Bali. “Kadang-kadang saya harus bicara keras dengan pemerintah yang lamban atasi masalah sosial di lapangan” kata Niluh

Kebijakan afirmatif 30% bagi perempuan menurut Niluh adalah pintu masuk bagi mereka untuk lebih berperan menyuarkan aspirasi. Hanya saja menurutnya belum optimal, karena itu perlu dukungan dari kalangan pergerakan perempuan sendiri. “Karena itu kita butuh lebih banyak lagi perempuan menduduki jabatan publik agar bisa menyuarkan kepentingan mereka dari dalam hatinya,” katanya.

Niluh tetap berjuang dengan caranya sendiri. “Walaupun berada di luar sistem kami tetap akan berjuang dan kami sanggup menembus “tembok-tembok” penghalang untuk aspirasi termasuk menuntut keterbukaan informasi publik.

Niluh bersuara melintasi berbagai lapisan sosial termasuk kalangan perguruan tinggi. Dia menekankan peran perempuan sebagai tonggak awal pendidikan moral. Ungkapan bahwa surga di bawah telapak kaki ibu, diterjemahkannya secara relevan dalam situasi kekinian. Ketika berdiskusi dengan tenaga akademis, dekan, rektor, Niluh menekankan pentingnya menyuarkan kondisi riil di lapangan agar lebih efektif.

Media sosial bisa digunakan secara positif untuk motivasi bagi perempuan kelas menengah ke bawah untuk menemukan kekuatan dalam diri mereka. Dan setelah terbentuk motivasi tersebut pemerintah perlu mengisinya dengan menyediakan saluran yang baik untuk penyaluran bakat, dan kemampuan mereka dengan karya yang nyata. Peran media sangat sentral agar kaumnya bisa mengerti akan hak-hak mereka.

“Suara Niluh”

Istri dari Louis Kieffer ingin membangun saluran informal sebagai ruang aspirasi bagi masyarakat di sekitarnya dengan cara yang elegan, santun dan tidak melanggar hukum dan norma sosial. Karena itu dia dirikan “Suara Niluh”. Dipekuat oleh praktisi hukum, diberikan juga advokasi bagi para pengadu apabila berkaitan dengan masalah hukum dan kebijakan pemerintah.

Dia sendiri sering bersuara lantang, dan bahkan sering berhadapan dengan aparat hukum seperti polisi untuk mengadvokasi masalah kekerasan dalam

Dia sendiri sering bersuara lantang, dan bahkan sering berhadapan dengan aparat hukum seperti polisi untuk mengadvokasi masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Namun karena dia yakin benar apa yang disampaikan dia tak gentar. Kuncinya adalah harus perjuangkan sesuatu yang benar dan menyangkut hidup orang banyak.

rumah tangga (KDRT). Namun karena dia yakin benar apa yang disampaikan dia tak gentar. Kuncinya adalah harus perjuangkan sesuatu yang benar dan menyangkut hidup orang banyak.

Untuk sampai pada tahap ini, Niluh harus bisa bebas kepentingan. Artinya bahwa apa yang diperjuangkannya harus berdiri di atas kebenaran. Ketika membela kasus KDRT, tujuan bukan memperlakukan suami, tapi agar bisa jadi pelajaran untuk memperbaiki hubungan dalam rumah tangga. Cara ini juga bisa menginspirasi banyak perempuan untuk bisa hadapi situasi berat dalam keluarga dan kelak bisa keluar dari keterpurukan. Dia percaya gerakan kolektif yang dilakukan bersama akan memberikan efek yang besar akan mendapat perhatian pemerintah.

Niluh terus bersuara lantang agar pemerintah bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat. “Untuk institusi pemerintah, pejabat publik, kepala daerah, untuk mereka yang memiliki kewenangan dan kekuasaan, kalian harus tahu kenapa kalian ada disitu. Harus paham mengapa kalian berada disitu”. Dia mengajak mereka untuk selalu ingat bahwa kedudukan itu ada untuk kepentingan rakyat karena itu saya sebagai pelayan masyarakat, ditopang oleh pengorbanan bahkan darah dan air mata rakyat. “Jadilah pejabat publik yang berkarakter bersih, transparan yang punya prinsip dan integritas dan punya empati yang punya hati nurani dan kalian bisa menjadi ibu bapak, menjadi sandaran rakyat tanpa melihat warna dan pilihan politik.

Tak Lelah Mendorong Keterbukaan Informasi



Perjalanan Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Rospita Vici Paulyn, S.T dalam jabatan publik, di Komisi Negara Independen (KNI) sudah cukup lama. Apa yang diraihinya kini adalah buah dari pengabdian bukan sehari dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik dalam mendorong demokratisasi di Indonesia.

Setelah menjadi sebagai komisioner di Komisi Informasi Daerah (KID) Kalimantan Barat bahkan menjadi ketua untuk 2 periode--- perempuan energik yang akrab disapa Vici oleh koleganya ini berhasil menapak ke jabatan yang lebih tinggi sebagai komisioner tingkat nasional periode 2022-2026.

Menurut perempuan kelahiran Jayapura Papua ini, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjadi momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. Dengan lahirnya UU KIP maka terjadi perubahan paradigma baru baik bagi masyarakat maupun bagi sistem Pemerintah Indonesia, dimana UU KIP diharapkan dapat menjadi kontrol terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik agar pengelolaan anggaran bersih, transparan dan akuntabel.

Mantan direktur eksekutif di sebuah perusahaan konsultan yang bergerak di bidang jasa konstruksi ini, berpendapat bahwa Badan-Badan Publik (BP) dituntut untuk membuka seluruh informasi yang dikuasainya sepanjang tidak termasuk dalam informasi yang dikecualikan. Tuntutan ini membuat Badan Publik harus banyak berbenah dan melakukan perubahan terhadap sistem pengelolaan dan pelayanan informasi pada institusinya. "Hak akses atas informasi yang sebelumnya sulit diperoleh, sekarang cenderung menjadi lebih mudah dan informatif"

Di era keterbukaan ini, katanya, peran serta masyarakat menjadi elemen penting dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Dengan adanya partisipasi masyarakat secara optimal, maka akan terwujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, menurut sarjana Teknik Sipil dari Universitas Tanjungpura Pontianak peran serta masyarakat diharapkan dapat menjadi inisiator dalam menciptakan transparansi di lingkungan badan publik dengan cara mengajukan permintaan informasi.

Sebagai aktivis, Vici terlibat dalam pemberdayaan perempuan melalui misalnya aktif dalam Forum Sarjana Perempuan

(FORSSAP) Kalimantan Barat, bahkan pernah didapat sebagai ketua umumnya. Menurutnya, kebebasan dan keterbukaan merupakan anugerah yang diharapkan oleh banyak pihak termasuk didalamnya perempuan Indonesia, Namun pada kenyataannya, perempuan masih kerap menjadi pihak yang paling rentan mengalami diskriminasi, intimidasi, kekerasan, ancaman, dianggap remeh dan tidak penting. Dalam berbagai sektor, eksistensi perempuan masih disuborganisasikan karena kemampuan dan ketrampilan dari banyak perempuan yang masih dipandang minim. Akibatnya perempuan menjadi pihak yang paling sedikit mempunyai akses pada berbagai bidang seperti Kesehatan, pendidikan, pelatihan, maupun untuk memperoleh kesempatan kerja dan kebutuhan lain.

Vici melihat kondisi ini dirasakan juga oleh para perempuan dalam penggunaan hak untuk tahunya dalam mendapatkan informasi publik. Sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki hak untuk tahu, maka perempuan Indonesia juga memiliki hak untuk mengetahui dan mendapatkan informasi publik. Bahwa perempuan Indonesia juga dapat berperan aktif untuk membuka informasi seluas-luasnya pada badan-badan publik, ikut serta setiap pengambilan kebijakan publik, dan turut mengawasi penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan anggaran dari APBN, APBD, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat agar tepat sasaran.

Sayangnya, hak untuk mendapatkan informasi tersebut juga belum bisa dirasakan sepenuhnya oleh perempuan Indonesia. Melihat Potret Keterbukaan Informasi di Indonesia, jumlah pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi sangat sedikit sekali yang merupakan Pemohon Informasi perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam menggunakan haknya untuk tahu masih sangat minim sekali.

Dalam hal permintaan informasi publik oleh kaum perempuan tersebut, menurut perempuan yang pernah menjadi Ketua Umum Asosiasi Sarjana Teknik (AsSTek) Perwakilan Jabotabek-Bandung dan pengurus organisasi BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kalimantan Barat ini, ditemukan adanya kasus diskriminasi, intimidasi, dan ancaman yang dilakukan oleh oknum badan publik ketika permohonan informasi publik yang dilakukan oleh perempuan. Ini tentunya menjadi tambahan catatan panjang bagaimana perempuan masih dipandang sebagai pihak yang lemah, tidak berdaya, tidak berkemampuan, tidak memiliki hak setara dengan laki-laki, dan tidak perlu tahu banyak hal. Padahal terkait hak perempuan, landasan konstitusional Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

“Sangat miris memang, mengingat bagaimana banyak sosok perempuan yang berprestasi, memiliki kemampuan dan daya saing, namun akhirnya takut untuk terjun ke dunia luas bersaing dengan para lelaki hanya karena tuntutan perannya sebagai ibu rumah tangga,” kata Wakil Sekretariat Bidang Kemasyarakatan di Komisariat Dewan Perwakilan Daerah Pemuda Katolik Kalimantan Barat ini.

“Jadilah perempuan yang cerdas dan kritis. Bahwa perempuan dan laki-laki punya hak yang sama! Bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai potensi kecerdasan yang sama, kesempatan bersaing yang sama di ruang publik, hak Pendidikan yang sama, hak memilih dan dipilih yang sama, hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya yang sama, hak berpartisipasi dalam organisasi/perkumpulan di masyarakat yang sama dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender,” kata pengurus Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Kalimantan Barat ini.

Untuk itu, kepada para perempuan Indonesia, Vici mengajak untuk menggunakan hak untuk tahu! Perempuan juga harus bisa menjadi pelopor dalam mendorong Keterbukaan Informasi Publik di badan-badan publik. Minta informasi apa saja yang dibutuhkan kepada badan publik terkait. Gunakan prosedur yang benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika badan publik tidak merespon hak anda untuk tahu, laporkan ke Komisi Informasi. Dalam sidang penyelesaian sengketa informasi publik, Majelis Komisioner bisa “memaksa” badan publik untuk memberikan hak untuk mendapatkan informasi publik, jika informasi yang dibutuhkan bersifat terbuka dan dapat diakses. ■



Srikandi Komisi Informasi Daerah



MONA ANGGRAINI
Wakil Ketua Komisi Informasi
Provinsi Bengkulu



CHATARINA PANCER ISTIYANI
Wakil Ketua Komisi Informasi
Provinsi Kalimantan Barat



HJ. FAHRANI
Komisioner Bidang PSI, Komisi Informasi Bangka Belitung



SETNI BETLINA
Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah



HENNY HASNA INGOLO
Komisioner Bidang ASE
Komisi Informasi Prov. Sulawesi Tengah



ERNIATI
Komisioner Bidang PSI
Komisi Informasi Prov. D.I. Yogyakarta



YUDANINGSIH
Komisioner Bidang PPID & Asistensi
Komisi Informasi Jawa Barat



NI LUH CANDRAWATI SARI
Komisioner Bidang PSI
Komisi Informasi Bali



HJ. YULIANTI
Komisioner Bidang Kelembagaan
Komisi Informasi Prov. Riau

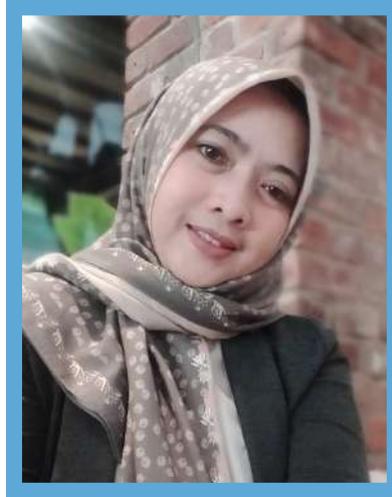


NUR MAHYA
Komisioner Bidang Kelembagaan
Komisi Informasi Prov. Kalimantan Selatan

REGIONAL



LUTFIYAH HANDAYANI
Komisioner Bidang ASE
Komisi Informasi Kota Cirebon



ERNI WAHYUNI
Komisioner Bid. Kelembagaan
Komisi Informasi Kalimantan Timur



ITA ROSITA
Ketua Komisi Informasi
Provinsi Bangka Belitung



SITI MASNIDAR
Komisioner Bid. Kelembagaan
Komisi Informasi Prov. Jambi



CUT ALMA NURAFIAH
Komisioner Bid. Kelembagaan
Komisi Informasi Prov. Sumatera Utara



NELVIA GUSTINA
Wakil Ketua Komisi Informasi
Prov. DKI Jakarta



YUSTINA FENDRITA C
Komisioner Bidang ASE
Komisi Informasi Sulawesi Tenggara



FAUZIAH ERWIN
Komisioner Bidang ASE
Komisi Informasi Sulawesi Selatan



RAHMIATI
Komisioner Bidang PSI
Komisi Informasi Kalimantan Selatan



HJ. NURLAILY IDRUS
Komisioner Bid. Kelembagaan
Komisi Informasi Provinsi Aceh



SRI SURANI
Komisioner Bidang PSI
Komisi Informasi D.I Yogyakarta



ARFITRIATI
Komisioner Bidang ASE
Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat



HIBZA MEIRIDHA BADAR
Komisioner Bidang ASE
Komisi Informasi Sumatera Selatan



ELIS YUSNIYAWATI
Komisioner Bidang PSI
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur



TANTI ENDANG LESTARI
Komisioner Bidang Kelembagaan
Komisi Informasi Prov. Sumatera Barat



MK KI Pusat Putuskan Permohonan Informasi Setelah 2 Kali Mangkir

Upaya, KI mendorong keterbukaan publik makin membuahakan hasil nyata. Masyarakat biasa semakin sadar, bahwa hak mendapatkan informasi, atau hak untuk tahu adalah bagian dari hak-hak dasar yang mereka miliki dan harus diperjuangkan. Publik sadar bahwa informasi pada Badan Publik, itu berguna untuk mereka karena kebijakan pemerintah yang diambil adalah demi kepentingan masyarakat banyak.

Beberapa keputusan penting telah diambil Majelis Komisiner KI berkenaan dengan sengketa informasi. Publik berharap agar informasi tersebut harus dibuka seluas-luasnya apalagi kalau menyangkut hak hidupnya sebagai warga negara. Hanya memang dalam undang-undang disebutkan juga bahwa tidak semua informasi, demi alasan politik dan kenegaraan, dibuka kepada publik. Informasi ini dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan.

Seperti belum lama ini, Majelis Komisiner (MK) Komisi Informasi (KI) Pusat putusan gugur terhadap permohonan pemohon atas nama Ade Suswanto karena dua kali berturut turut tidak menghadiri persidangan di KI Pusat. Sedangkan termohon adalah Badan Publik (BP) Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.

Putusan sela itu dibacakan MK KI Pusat dalam persidangan yang dipimpin Ketua MK Gede Narayana beranggotakan Handoko Agung Saputro bersama Arya Sandhiyudha didampingi Panitera Pengganti (PP) Indra Hasby di ruang sidang Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta, Senin (10/10/2022).

Persidangan dengan agenda tunggal pembacaan putusan gugur itu, diawali dengan persidangan pertama untuk memastikan kehadiran pemohon yang tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang jelas. Kemudian MK memutuskan untuk men-skors persidangan pertama selama 10 menit dengan

pertimbangan akan dilakukan penyusunan putusan gugur karena pemohon dua kali berturut-turut tidak hadir persidangan, yakni pada persidangan 3 Oktober 2022 dan 10 Oktober 2022.

Adapun register pemohon yang dinyatakan gugur itu adalah register sengketa informasi nomor 041/IX/KIP-PS/2019 antara pemohon individu Ade Suswito terhadap termohon Badan Publik (BP) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI. MK menyampaikan pertimbangannya bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut melalui Surat Panggilan Sidang untuk hadir pada Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal 3 Oktober dan 10 Oktober 2022.

Namun dalam dua kali persidangan Pemohon dan atau kuasanya tidak hadir tanpa memberikan keterangan dan alasan yang jelas kepada Panitera Pengganti. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur mengenai permohonan yang dinyatakan gugur karena ketidakhadiran Pemohon dan/atau kuasanya selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas: Pasal 30 Perki No. 1 Tahun 2013 tentang PPSIP "Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan dinyatakan gugur."

Kemudian MK membacakan amar putusan yang menyatakan Permohonan Pemohon dengan Register Sengketa Gugur. Dengan demikian, register tersebut telah dinyatakan gugur dan tidak dapat dilanjutkan, dalam persidangan pembacaan putusan itu, kuasa termohon hadir.

Ketua Majelis Komisioner (MK) Komisi Informasi (KI) Pusat Gede Narayana beranggotakan Arya Sandhiyudha bersama Handoko Agung Saputro didampingi Panitera Pengganti (PP) Indra Hasby menyidangkan register sengketa informasi 041/IX/KIP-PS/2019 antara Ade Suswito terhadap Badan Publik (BP) Kementerian Polhukam RI di ruang sidang 1 Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta, Rabu (21/09/2022). Dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan awal itu, pemohon tidak menghadiri persidangan dan meminta penundaan sidang, sementara kuasa dari termohon hadir tiga orang.

Meski tanpa dihadiri pemohon, MK KI Pusat tetap melaksanakan persidangan tersebut karena proses persidangan sengketa informasi cepat, tepat waktu dan berbiaya murah. MK

menyatakan persidangan pemeriksaan awal ini tetap dijadikan persidangan pertama, sehingga jika pemohon tidak hadir dalam dua kali persidangan tanpa alasan yang jelas maka MK dapat memutuskan permohonan pemohon gugur.

MK telah memeriksa legal standing dari semua kuasa termohon yang hadir sehingga dianggap memenuhi syarat sebagai kuasa termohon. Bahkan termohon sempat menyampaikan bahwa informasi yang diminta pemohon tidak diproduksi oleh termohon dan telah meneruskan permohonan informasi tersebut ke Kodam Jaya.

Kemudian MK memutuskan untuk melanjutkan persidangan ini yang dijadwalkan pada 3 Oktober 2022. Adapun informasi yang diminta adalah penjelasan sesuai Hukum dan UU Agraria, UUD 1945 atas adanya pengakuan TNI AD cq Kodam Jaya yang telah mendalilkan dan mengakui secara sepihak sebagai pemilik Tanah Girik C.487 an Un Kang lh di Kelurahan Ceger, Cipayung, Jakarta Kodam Jaya dan aparat pejabatnya wajib dan dapat membuktikan antara lain: Surat pengalihan Hak, Akta jual beli dan bukti pembelian surat tanah girik C.487, Tanda bukti fisik surat yang mungkin sudah didaftarkan kepada Negara, Batas tanahnya dan kronologis perubahan peta hingga lokasi penentuan girik C.487, dan Pembuktian lainnya, pengakuan kepemilikan Kodam yang tidak disebutkan satu persatu.

Sementara pada persidangan sebelumnya di hari yang sama Ketua MK KI Pusat Syawaludin beranggotakan Samrotunnajah Ismail bersama Handoko Agung Saputro didampingi PP Indra Hasby, melaksanakan persidangan dengan agenda pembacaan putusan. Pembacaan putusan dilakukan terhadap register sengketa 023/VIII/KIP-PS./2021 antara Pemohon Rosyidah terhadap Termohon BP (Badan Publik) MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia).

Dalam amar putusannya, MK menyatakan menerima permohonan informasi pemohon untuk seluruhnya. MK juga memutuskan informasi yang diminta pemohon adalah informasi terbuka hanya bagi pemohon, yaitu informasi mengenai Surat Keterangan Direktur RS Hermina No. 2695/Yanmed/RSHBKS/2018 tentang Penjelasan bahwa teradu yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Februari 2014, dr. Angeline tidak pernah menangani pasien dirawat di RS Hermina Bekasi/tidak sedang dinas RS Hermina Bekasi/tidak ada di RS Hermina.(Karel Salim/ Foto: Rizky Priyatna) ■



Semua Ada Dalam 3 Seri Buku

Komisi Informasi Pusat (KI) mendokumentasikan semua kegiatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2022 secara komprehensif dalam buku 3 seri buku. Kegiatan Launching Buku I, II, dan III ini menandakan upaya pamungkas dari KI Pusat RI atas semua kegiatan yang memonitor, mengevaluasi serta rekomendasi yang diperlukan dalam pelaksanaan undang-undang tersebut di masa mendatang.

Menurut komisioner KI Pusat Bidang Penelitian dan Dokumentasi, Rospita Vici Paulyn dalam kegiatan launching buku-buku tersebut mengatakan buku yang terdiri dari 3 jilid ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai metode, tahapan, penilaian hingga analisis yang telah dilakukan terhadap implementasi Undang Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagaimana diketahui, IKIP tahun 2022 prosesnya telah dimulai sejak dari bulan Februari, diawali dari tahapan penyusunan

dasar hukum, bimbingan teknis kepada seluruh kelompok kerja daerah, pengumpulan data dan wawancara kepada para informan ahli daerah, FGD di 34 provinsi, dan National Assessment Council (NAC) Forum IKIP 2022, hingga terbitnya buku I, II, dan III IKIP 2022 yang merupakan tanggungjawab bersama seluruh keluarga besar komisi informasi di Indonesia, dan tidak terlepas juga dari kerja sama dengan instansi terkait lainnya.

Menurut Vici, terdapat tiga seri buku yang mengupas secara terperinci bagian per bagian dari proses penyusunan indeks. Buku 1 merupakan buku utama yang menggambarkan proses penyusunan IKIP dari awal hingga akhir. Buku 2 berisi ringkasan eksekutif (executive summary) yang memuat pokok-pokok penting dari hasil penyusunan IKIP. Sedangkan Buku 3 merupakan elaborasi atas situasi keterbukaan informasi di 34 provinsi beserta dengan capaian IKIP masing-masing daerah. Menurut mantan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat ini,

dengan hadirnya 3 seri buku ini semoga bisa membantu publik dalam memahami situasi keterbukaan informasi di Indonesia secara komprehensif dan mendalam.

LEBIH KENCANG LAGI

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR, Meutia Viafa Hafid dalam sambutan peluncuran buku IKIP 2022 mengatakan bahwa, Indonesia sebagai salah satu pendiri Open Government Partnership (OPG) harus terus berkomitmen untuk meningkatkan ketersediaan informasi, mendukung partisipasi publik, menerapkan integritas tertinggi, dan meningkatkan akses teknologi untuk memperoleh informasi.

“Itu artinya, informasi menjadi salah satu kepedulian negara untuk dijamin dalam menjawab kebutuhan berinformasi rakyat Indonesia. Terlebih jika informasi tersebut datang untuk kepentingan publik, maka harus kembali pada publik itu sendiri, tentunya melalui kebijakan pemerintah yang baik dan tepat. Saya berharap dengan adanya Launching Buku ini, maka kita benar-benar dapat mewujudkan harapan-harapan besar bagi Indonesia dalam mem-

bangun ekosistem berinformasi oleh pemerintah. Tentunya dengan formasi komisioner yang baru di tahun 2022, IKIP harus memiliki parameter yang semakin jelas dan *sustainable*,” kata Meutia

Dengan kenaikan rerata indeks yang tidak signifikan, Meutia berharap agar semua pihak mengejanya dengan kerja keras semua pihak. Dengan indeks yang makin baik, menurut Meutia, dapat memberikan sumbangan yang signifikan dalam menentukan kebijakan negara ke depannya.

Dia menggarisbawahi lagi, bahwa *core value* dari keterbukaan informasi, yang dirumuskan secara detail dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, terutama pasal 3 adalah terwujudnya *good governance*, agar negara ini dikelola sebaik-baiknya bagi kemakmuran rakyat.” Rekomendasinya dijalankan, dan targetnya harus lebih tinggi lagi,” tegas Meutia.

Mengutip Statista Research Department (Lembaga Riset Milik Jerman) Meutia menekankan bahwa Indeks Keterbukaan Informasi Publik digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah berbagi informasi, memberdayakan masyarakat dengan

Indeks Keterbukaan Informasi Publik 6 digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah berbagi informasi, memberdayakan masyarakat dengan meminta pertanggungjawaban pemerintah, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pertimbangan kebijakan publik.

meminta pertanggungjawaban pemerintah, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pertimbangan kebijakan publik.

Meutia juga mengacu pandangan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menilai bahwa Indeks Keterbukaan Pemerintah di dunia adalah upaya pemerintah suatu negara untuk menerapkan data yang terbuka di tiga aspek penting - Keterbukaan Informasi, Kegunaan Informasi dan Pemanfaatan Kembali data pemerintah.

“Karena KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK tidak dapat dipandang sebelah mata. Negara-negara maju sekalipun mengakui IKIP dapat menjadi alat kontrol masyarakat dalam setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Badan Publik terutama pemerintah,” tegas politisi partai GOLKAR, yang juga mantan jurnalis TV tersebut. Keterbukaan informasi, menurut Meutia bisa menjadi alat kontrol atas kebijakan pemerintah yang diambil bagi kesejahteraan rakyat yang diurusnya.





“Karena KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK tidak dapat dipandang sebelah mata. Negara-negara maju sekalipun mengakui IKIP dapat menjadi alat kontrol masyarakat dalam setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Badan Publik terutama pemerintah.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi, Komunikasi, Informasi dan Aparatur, Kementerian Koordinator Polhukam, Marsda TNI Dr. Arif Mustofa, M.M mengatakan peluncuran Buku I, II, dan III mengenai IKIP 2022, yang dipublikasikan secara masif dan serentak, dapat meningkatkan pemahaman seluruh pengelola informasi di badan publik tingkat provinsi mengenai amanat UU Keterbukaan Informasi Publik, sekaligus pemahaman untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat, serta dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara.

SENJANG

Mantan komisioner KI Pusat, Romanus Ndau Lendong mengatakan kendati gembira dengan peningkatan skor rerata nasional menjadi 74,43 dari 71, 37 setahun sebelumnya,

Roman melihat kesenjangan antar wilayah masih terjadi seperti di Provinsi Papua Barat dan Maluku Utara. + Marginalisasi perempuan dalam penyelenggaraan IKIP dimana IA perempuan hanya 58 orang atau 19% dari total 306 IA.

Dia menambahkan, persoalan aktual dewasa ini seperti peretasan data yang dilakukan oleh Bjorka atau kaburnya informasi pada kasus yang menimpa Brigadir J (alm) menunjukkan ada persoalan keterbukaan informasi di Badan Publik (BP). “Koordinasi dan sinkronisasi informasi antara BP masih jadi kendala serius,” kata dosen di Stikom Taranita itu. Selain budaya keterbukaan yang masih lemah, penyelenggaraan monitoring evaluasi (Monev) dan IKIP perlu diperbaiki metodenya agar hasilnya lebih objektif.

Romanus menyarankan

mulai dari Presiden agar membenahi kemampuan komunikasi publiknya yang saat ini dinilainya sangat buruk. Selain itu, prinsip keterbukaan agar lebih sensitif pada gender terutama perempuan. “Jadikan informasi publik untuk mengatasi kesenjangan antara wilayah yang bisa berpotensi terjadinya persoalan politik, keamanan, dan hukum yang bisa mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

RANTAI PUTUS

Pemimpin Redaksi KOMPAS, Tri Agung Kristanto pada event yang sama mengatakan, informasi merupakan hak publik, yang dijamin oleh Konstitusi maupun UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta berbagai aturan internasional, termasuk yang terkait dengan ke-

hidupan pers.

“Sesungguhnya ada kesamaan peran Antara Komisi Informasi (Pusat dan Daerah) dengan media massa, yang diatur dalam UU No. 40/1999, yaitu sama-sama melayani kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan menjadi jembatan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi dari pihak lain. Komisi Informasi memang terbatas pada badan Publik,” kata Tri.

Meskipun memiliki kesamaan, kata Tri, tetapi ternyata ada “rantai” yang putus dalam relasi antara Komisi Informasi dengan media massa. Dalam UU No. 14/2008, sebagai UU yang lahir belakangan dibandingkan UU Pers. Ternyata tak ada yang pengaturan mengenai partisipasi publik dalam menyebarkan atau mendukung perwujudan dari informasi sebagai hak masyarakat. Komisi

Informasi pun tak mempunyai wewenang untuk membangun sinergi dengan pemangku kepentingan dalam masyarakat yang terkait dengan informasi, khususnya media massa (pers).

Jika saja Komisi Informasi dan media massa bisa “jumbuh”, saling melengkapi, rasanya hak publik untuk mendapatkan informasi akan semakin kuat. Komisi Informasi bisa membangun sinergi dengan Dewan Pers atau dengan media massa. Tak ada kata terlambat, rantai putus itu bias disambung kapan pun, tetapi harus segera dilakukan. ■





Indeks Keterbukaan Semakin Membaik

Kinerja Komisi Informasi (KI) makin hari makin baik. Selain keberadaannya dan perannya makin dikenal publik, lembaga publik pun semakin berminat untuk menunjukkan lembaganya sebagai institusi yang transparan, membiarkan masyarakat mengetahui apa yang mereka lakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban mereka kepada masyarakat.

Kampanye tak henti dengan mendorong lembaga publik untuk makin terbuka sudah membuahkan hasil yang memadai. Hal itu terlihat dari hasil akhir Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2022, di mana makin banyak lembaga yang dinilai dan terbuka pada penilai KIP.

Dan yang lebih penting tentu saja, pencapaian IKIP makin membaik dari sisi hasil mau-

pun lembaga yang naik kelas baik yang tadinya kurang informatif menjadi cukup informatif, maupun dari kurang informatif menjadi informatif. Secara umum ada peningkatan skor secara nasional menjadi 74,43 dengan kategori "SEDANG" dari tahun 2021 lalu sebesar 72,42.

IKIP disusun untuk mendapatkan gambaran indeks keterbukaan tingkat Provinsi dan Nasional di Indonesia untuk mendapatkan rerata indeks keterbukaan nasional. Menurut Ketua KI, Donny Yoesgiantoro, tujuan utama pengukuran indeks adalah untuk menyediakan data dan gambaran Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, memberikan rekomendasi terkait arah kebijakan Nasional mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan memastikan rekomendasi tersebut dijalankan.

Selain itu tentu saja mengasistansi Badan Publik dalam mendorong pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di tingkat pusat dan daerah oleh Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi dan kabupaten/kota, memberikan masukan dan rekomendasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah serta nasional, dan memberikan laporan pencapaian Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia.

Komisioner bidang Penelitian dan Dokumentasi, Rospita Vici Paulyng mengatakan, Penyusunan IKIP merupakan program prioritas nasional untuk mengukur sejauh mana implementasi Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada 34 provinsi se-Indonesia sebagaimana tertuang dalam Rencana pembangunan jangka menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Pada Tahun 2022 ini, target IKIP adalah 72 (atau berada dalam kategori sedang). Untuk itu kita patut bersyukur bahwa hasil IKIP yang diperoleh berada pada skor 74,43 masih berada pada kategori sedang, namun nilai ini mengalami kemajuan /peningkatan dibanding tahun 2021 dengan skor 71,37.

Aspek yang diukur adalah relevansi keterbukaan informasi bagi politik, ekonomi dan hukum. Ketiga hal ini merupakan bidang-bidang penting yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga harus disorot secara tajam. Keberhasilan IKIP



Pengukuran IKIP melibatkan banyak pihak antara lain tim ahli yang menyusun teknis penyusunan indeks, para pakar yang memberikan overview atas temuan di lapangan serta para praktisi di bidang komunikasi, media massa serta perwakilan dunia usaha dan masyarakat.

tahun 2022 ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh pokja daerah yang telah terlibat, seluruh informan ahli Daerah yang telah memberikan penilaiannya atas implementasi keterbukaan informasi publik di masing-masing provinsi.

Pengukuran IKIP melibatkan banyak pihak antara lain tim ahli yang menyusun teknis penyusunan indeks, para pakar yang memberikan overview atas temuan di lapangan serta para praktisi di bidang komunikasi, media massa serta perwakilan dunia usaha dan masyarakat.

Berdasarkan pedoman pembuatan IKIP, Indeks ini menganalisis 3 aspek penting yang mencakup kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP (*obligation to tell*), persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi (*right to know*), dan kepatuhan Badan Publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi terutama kepatuhan dalam melaksanakan putusan sengketa informasi publik untuk menjamin hak masyarakat atas informasi (*access to information*).

Penyusunan IKIP ini dimulai pada tahun 2021 dengan nilai nasional sebesar 71.37 yang berada pada kategori kategori “sedang” dengan 3 nilai tertinggi bagi daerah Bali dengan nilai indeks 83.15, Kalimantan Barat dengan nilai indeks 80.38, dan Aceh dengan nilai indeks 79.51. Sedangkan 3 nilai terendah adalah daerah Maluku Utara dengan nilai indeks 63.19, Sulawesi Tengah dengan nilai indeks 55.72, dan Papua Barat dengan nilai indeks 47.48.

Menurut Vici, Indeks keterbukaan Informasi Publik (IKIP) bukan dipandang sebagaimana layaknya kompetisi adipura dimana setiap daerah berlomba-lomba untuk memberikan nilai

tertinggi. Namun harus sesuai dengan data dan fakta yang relevan sehingga hasil potret IKIP ini dapat dipertanggungjawabkan dan dijadikan rujukan dalam indeks-indeks komposit lainnya seperti Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dan lain-lainnya.

Aspek yang diukur adalah relevansi keterbukaan informasi bagi politik, ekonomi dan hukum. “Ketiga hal ini merupakan bidang-bidang penting yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga harus disorot secara tajam,” kata Wakil Ketua KI Pusat Arya Sandhiyudha.

Arya Sandhiyudha selanjutnya mengatakan IKIP bertujuan untuk menyediakan data dan gambaran Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, memberikan rekomendasi terkait arah kebijakan Nasional mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan memastikan rekomendasi tersebut dijalankan, mengasistansi Badan Publik dalam mendorong pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di semua tingkatan pemerintah dengan basis data yang memadai.

Hasil IKIP 2021, menempatkan 3 (tiga) provinsi memperoleh nilai IKIP Nasional dalam

kategori “Baik”. 29 Provinsi masuk dalam kategori “Sedang” dan 2 provinsi masuk dalam kategori “Buruk”. “Hasil IKIP akan digunakan sebagai basis dalam perbaikan keterbukaan informasi publik di masa mendatang, “tegas Arya.

Walau ada peningkatan skor secara nasional, beberapa komisioner daerah melihat bahwa pengukuran tersebut belum mencerminkan realitas sesungguhnya di lapangan. Karena itu seorang komisioner dari Provinsi Aceh meminta agar kelak harus ada lembaga independen yang mengukur kualitas keterbukaan informasi publik agar lebih akuntabel. Salah satu komisioner dari Provinsi Jawa Tengah juga melihat soal independensi penilaian tim ahli yang bekerja mengukur kadar keterbukaan ini. Karena itu mereka menyarankan agar metode penetapan tenaga ahli perlu disesuaikan bila perlu diubah di masa mendatang.

EKONOMI MENGGEMBIRAKAN

Anggota tim ahli IKIP, yang juga mantan komisioner KI, Romanus N Lendong melihat ada kemajuan signifikan dari sisi keterbukaan



informasi bidang ekonomi sebesar 75,46, sebagai tertinggi dibanding fisik dan politik sebesar 75,20 dan hukum sebesar 73,28. IKIP tahun 2021 yang menempatkan rerata ekonomi terendah, yakni 70,24, Fisik dan Politik 71,55 dan hukum 75,86. "ada perbaikan insentif keterbukaan informasi terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya informasi-informasi publik telah banyak menolong masyarakat. Jadi harus integrasikan hak atas informasi dalam perumusan kebijakan terutama sektor ekonomi. Informasi publik merupakan stimulus bagi partisipasi," kata Romanus.

Praktisi komunikasi Fredy Tulung menambahkan keterbukaan informasi saja kurang cukup. Yang penting katanya, tentu saja partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik bagi masyarakat. Kebijakan yang elit sentri, katanya akan membuka ruang ketidakadilan, karena informasi akan dikuasai segelintir orang/elit.

Satu yang menarik, karena IKIP 2022, dianggap belum menggambarkan keberpihakan pada eksistensi perempuan (*blind gender*). Untuk itu IKIP merekomendasikan agar harus bisa mengarusutamakan (*mainstreaming*) perempuan dimulai dari regulasi terutama pada perempuan yang rentan seperti kaum difabel, anak-anak dan lansia. KI merekomendasikan agar dalam penyajian data publik, harus lebih spesifik memilah data perempuan dari misalnya lapangan kerja per sektor yang banyak dikuasai perempuan.

Dalam kasus yang menimpa perempuan yang masuk kategori sengketa harus bisa digambarkan apa yang menyebabkan intimidasi pada perempuan dan butuh pendampingan. Demikian



Dalam kasus yang menimpa perempuan yang masuk kategori sengketa harus bisa digambarkan apa yang menyebabkan intimidasi pada perempuan dan butuh pendampingan.



Komisi Informasi Rapatkan Barisan Demi PEMILU Yang Dipercaya Publik

Mengingat Pemilihan Umum (PEMILU) yang semakin mendekat, Komisi Informasi Pusat (KI) perlu mendorong semua pihak agar, proses penyelenggaraan PEMILU dilakukan dengan terbuka, jujur, transparan dan akuntabel. Karena itu berbagai pihak, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara, maupun lembaga pendukung lainnya perlu bekerja serius, mempersiapkan peraturan serta penegakan peraturan agar terjamin pemilu yang adil dan jujur dan mencerminkan harapan rakyat banyak.

Ketua KI Pusat Donny Yoegiantoro mengatakan, bahwa baik secara formal, KI akan membantu KPU agar membuka selebar-lebarnya tahapan-tahapan pemilu serta pihak yang terlibat dalam kontestasi, baik mereka yang menjadi anggota legislative (DPR/D, kepala daerah maupun presiden dan wakil

presiden). Selain dukungan moral yang kuat, secara kelembagaan KI akan berperan sebagai pihak yang terus menyuarakan agar informasi tentang pemilu disampaikan secara apa adanya.

Untuk itu belum lama ini Komisi Informasi Pusat RI melaksanakan Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) ke-13 KI Se-Indonesia 12-14 Oktober 2022 di Kota Semarang. Acara tersebut diawali Seminar Publik dengan menghadirkan narasumber Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos, Tenaga Profesional Lemhannas Ninik Rahayu, dan Guru Besar Unair Prof Hendri Subiako. Kegiatan akbar tahunan KI Pusat ini bertitel "Peran Komisi Informasi Mengawal Penyelenggaraan Pemilu yang Transparan dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional", kegiatan akbar lainnya adalah IKIP (Indeks Keterbukaan Informasi Publik), Monev (Monitoring dan Evaluasi),

Hari Hak untuk Tahu Se-Dunia (RTKD/Right to Know Day), dan tulus di bidang PSI (Penyelesaian Sengketa Informasi).

Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro menyampaikan bahwa tema Rakornas tahun ini merupakan telaah atas situasi bangsa memasuki tahapan pesta demokrasi, yakni Pemilu dan Pemilihan 2024. “Komisi Informasi harus memberikan dukungan energi positif bagi keberhasilan penyelenggaraan pemilu dan Pemilihan yang dilaksanakan serentak pada tahun 2024 supaya pelaksanaannya transparan dan akuntabel,” tegas Donny dalam sambutan pembukaan rakornas di Hotel Patra Semarang, Rabu (12/10/2022) malam.

Rakornas dibuka oleh Gubernur Jateng diwakili Kadis Kominfo Riena Retnaningrum dihadiri Komisioner KI seluruh Indonesia, Bupati/Walikota se- Jateng, dan sejumlah pejabat daerah Jateng, KPU dan Bawaslu Jateng. Keynote Speech Menkominfo disampaikan Dirjen IKP Usman Kansong dan sambutan Deputi Polhukam Bappenas Slamet Soedarsono.

Lebih lanjut Donny menyampaikan bahwa diperlukan keterbukaan informasi pemilu dan pemilihan oleh penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP), Partai Politik, dan masyarakat sebagai pemilih. “Keterbukaan informasi setiap tahapan pemilu dan pemilihan menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis sebagai pemenuhan hak asasi manusia,” ujarnya menjelaskan.

Ia mengatakan dalam konsepsi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik), informasi merupakan

an kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Untuk itu, menurutnya penyelenggaraan pemilu dan pemilihan harus memperhatikan prinsip dan asas KIP yang merupakan aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang transparan dan akuntabel.

Disampaikannya bahwa penerapan KIP dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan adalah hak masyarakat sebagai sarana mengoptimalkan pengawasan publik. Penerapan KIP dalam pemilu dan pemilihan dapat memberikan kepastian hukum dan jaminan terhadap hak masyarakat atas KIP yang berprinsip cepat, sederhana, tepat waktu, dan biaya ringan.

“KIP dapat memberikan jaminan akses informasi, kontrol masyarakat, serta meningkatkan pertanggungjawaban penyelenggara pemilu dan pemilihan sehingga

mewujudkan kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan pemimpin bangsa,” tegasnya lagi. Menurutnya sejumlah indikator KIP yang harus disediakan penyelenggara pemilu diantaranya, ketersediaan dan aksesibilitas informasi, akurasi informasi, keterbukaan proses, serta memberikan regulasi/kebijakan dalam proses akses informasi Pemilu dan Pemilihan.

Guru Besar FISIP Universitas Airlangga Surabaya, Prof Henri Subiarto mengatakan, ada dua jenis informasi yang penting berkenaan dengan pemilu yaitu, electorate information, yaitu tentang tata cara, proses, dan jalannya sistem Pemilu itu dilaksanakan. Termasuk aturannya, cara memberikan suara, cara perhitungan, dan tahapan-tahapannya dan lain sebagainya. Kedua adalah voters education, yaitu informasi yang mendidik masyarakat tentang pentingnya Pemilu, serta bagaimana meningkatkan kualitas Pemilu





yang adil, jujur, transparan, aman, serta menghasilkan kepemimpinan nasional yg terbaik berdasarkan pilihan rasional.

Henri mengetengahkan beberapa tantangan informasi publik yang susah dikendalikan dan bisa memporak-porandakan mutu demokrasi. Seperti media abal-abal, akun *anonim*, *buzzer*, *hoax* dan kebebasan komunikasi tanpa etika telah menjadi tantangan pers, komisi informasi (KI) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka tak hanya cari dukungan tapi juga bisa mendelejitimasi demokrasi.

Tantangan selanjutnya, menurut Henri adalah, masyarakat banyak mempersepsi apa yang ada di media sosial itu fakta. "Yang banyak muncul dianggap mayoritas dan kebenaran. Akibat *Computational propaganda* konflik semakin tajam, dan *spiral of silence*. *Bisa ada the real tragedy* saat perang internet terjadi lewat *hashtag*," kata Henry

Sedangkan pada saat pemilu ada beberapa hal yang

perlu diwaspadai yakni ; black Campaign : Kampanye menyebarkan keburukan pihak lain dengan memalsukan fakta (HOAX dan HATE SPEECH) sudah menjadi part of the political game. Kedua adalah negative campaign: Kampanye mengungkap keburukan pihak lain berbasis fakta. "Repotnya semua orang bisa memproduksi dan menyebarkan content kampanye kapanpun, dimanapun. *Anyone can be political Communicator*. Dan upaya ini melibatkan *buzzer*, *cyber army*, *influencer*, dan masyarakat yang fanatik.

RAPATKAN BARISAN

Sementara Penanggungjawab Rakornas ke-13 Handoko Agung Saputro menyampaikan bahwa KI sebagai lembaga yang dibentuk oleh UU KIP memiliki peranan dalam memastikan seluruh Badan Publik (BP) tidak terkecuali KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk melaksanakan prinsip dan asas KIP dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak

2024. "KI harus berkontribusi dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang transparan dengan menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik dan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis telah mengatur penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan secara transparan melalui Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan," terang Handoko yang juga mantan Komisioner KPU Jateng.

Ia menyampaikan penyelenggara pemilu dan pemilihan juga memiliki tantangan di era disrupsi (perubahan) saat ini dalam menjaga data yang dikelolanya. Menurutnya digitalisasi pemilu dan pemilihan merupakan sebuah keniscayaan dalam membangun demokrasi serta mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik yang legitimate.

Disampaikannya bahwa berbagai system informasi

“Ada dua jenis informasi yang penting berkenaan dengan pemilu yaitu, *electorate information*, yaitu tentang tata cara, proses, dan jalannya sistem Pemilu itu dilaksanakan. Termasuk aturannya, cara memberikan suara, cara perhitungan, dan tahapan-tahapannya dan lain sebagainya. Kedua adalah *voters education*, yaitu informasi yang mendidik masyarakat tentang pentingnya Pemilu, serta bagaimana meningkatkan kualitas Pemilu yang adil, jujur, transparan, aman, serta menghasilkan kepemimpinan nasional yg terbaik berdasarkan pilihan rasional.”

Prof Henri Subiakto,
Guru Besar FISIP Universitas Airlangga Surabaya

sejatinya telah dikembangkan oleh penyelenggara pemilu, seperti KPU membangun kanal/laman khusus yang menyajikan informasi berkaitan dengan kepemiluan yang dapat diakses pada <https://infopemilu.kpu.go.id>. Sementara Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki tugas pengawasan menyiapkan kanal/laman khusus Sistem Informasi Pengawasan Pemilu yang dapat diakses pada <http://sipp.bawaslu.go.id/>.

Untuk itu, ia meminta agar teknologi digital yang digunakan oleh KPU dan Bawaslu harus memperkuat keamanan data sehingga dapat menangkal gangguan dari hacker. “Jikapun ada issue adanya kebocoran data pada penyelenggara pemilu maka harus segera diberikan klarifikasi agar masyarakat tidak khawatir dan tetap percaya dengan system teknologi yang dibangun,” sarannya.

Plt Sekretaris KI Pusat Nunik Purwanti menyampaikannya maksud pelaksanaan Rakornas ini, pertama men-



guatkan koordinasi KI se-Indonesia dalam membangun sinergi dan Gerakan Bersama mewujudkan keterbukaan informasi. Kedua pengambilan peran dan pembahasan agenda kerja (action plan) KI Pusat, KI Provinsi dan KI Kabupaten/Kota menyambut pelaksanaan Pemilu 2024, ketiga perumusan langkah-langkah strategis yang harus diambil mensikapi Pemilu 2024.

Adapun tujuannya menurut Nunik, pertama untuk menguatkan kelembagaan KI Pusat, KI Provinsi dan KI Kabupaten/Kota dalam rangka Pemilu 2024. Kedua membahas agenda kerja (action plan) amanat Rapat Kerja Teknis (Rakernis) ke 11, dan ketiga merumuskan langkah-langkah strategis yang harus diambil mensikapi Pemilu 2024 (HUMAS KI). ■



Mencegah Informasi Yang Menyesatkan



Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa meminta Komisi Informasi mengawal para pejabat publik dalam menyampaikan informasi yang lengkap dan berkualitas untuk mencegah terjadinya misleading (menyesatkan) informasi di masyarakat. Hal itu disampaikan saat dialog dengan peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi seluruh Indonesia ke-13 di Hotel Patra Semarang, Kamis (13/10/2022).

Suharso menyampaikan bahwa saat ini sangat banyak terjadi misleading informasi yang disampaikan oleh sejumlah pejabat publik sebagai pimpinan Badan Publik. Ia mencontohkan tentang informasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan di sebuah kabupaten yang menyampaikan perlunya suntikan vaksin booster kepada masyarakat, namun tidak disampaikan secara jelas apa yang dimaksud dengan booster sehingga membingungkan masyarakat karena belum paham apa yang dimaksud dengan booster.

“Jangan sampai pejabat publik hanya ingin menyampaikan istilah-istilah viral agar dianggap populer di masyarakat tapi substansi informasi yang disampaikan pejabat tidak dimengerti



oleh masyarakat,” katanya menjelaskan. Ia berharap agar Komisi Informasi dapat mengambil peran yang lebih besar dalam mengawal pejabat badan publik untuk menyampaikan informasi yang sempurna, informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan.

Menurutnya, pejabat perlu menyampaikan informasi yang lengkap dan sempurna, misalnya unsur-unsur siapa, dimana, kapan, bagaimana, siapa dan sebagainya sehingga masyarakat paham apa yang disampaikan oleh pejabat publik tersebut. Ia juga mencontohkan informasi yang tidak lengkap dari kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) sehingga bisa membuat pertengkar di tingkat kalangan masyarakat bawah setingkat RT/RW, karena tidak tersedia informasi tentang siapa dan syarat apa saja yang diperlukan untuk yang berhak memperoleh BLT.

Demikian juga menurutnya untuk bidang demokrasi, masih banyak informasi yang disampaikan hanya prosedural saja, tapi konten informasi



EVENT



di bidang demokrasi yang substansial jarang disampaikan. "Banyak informasi yang disampaikan lembaga politik yang hanya bersifat populer dan substansi nya tidak disampaikan tentang track record dari calon pemimpin seperti calon bupati dan gubernur yang baik, maka dalam hal ini perlu peran dari komisi informasi mengawalinya," katanya lagi.

Ia juga menyarankan supaya dilakukan revisi Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagai upaya meningkatkan peran Komisi Informasi di Pusat dan Daerah. Mengingat tugas KI sebagai



pelaksana UU KIP sangat berat sehingga perlu mendapatkan dukungan melalui revisi UU KIP.

Sementara itu, Ketua Komisi Informai (KI) Pusat Donny Yoesgiantoro menyatakan menerima permintaan dari Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk mengawal pejabat publik dalam menyampaikan informasi agar tidak misleading informasi ke masyarakat. "Komisi informasi bersedia mengawal pejabat publik agar disampaikan informasi yang benar, akurat dan tidak menyesatkan yang selama ini sudah dilaksanakan oleh KI tapi belum maksimal karena kurang tersedianya anggaran," ucapnya.



EVENT



Untuk mengoptimalkan peran KIP dalam transparansi informasi publik Donny menyampaikan perlunya disediakan anggaran dari DAK (Dana Alokasi Khusus). Suharso sepakat dengan usulan Donny dan sudah semestinya pemerintah pusat mendukung penuh dengan dana yang memadai. Suharso mengatakan bahwa dana tersebut bisa diperoleh Komisi Informasi (KI) melalui usulan Kemenkominfo karena anggaran KI Pusat melekat disana. Menurutnya DAK sebesar Rp 35 Miliar bisa diusahakan melalui Kominfo untuk kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) KI se Indonesia karena tidak membani anggaran negara. ■





Memompa Semangat Tim



Hanya dalam semangat tim yang solid, erat dan saling mendukung, program kerja tanggung jawab Komisi Informasi Pusat (KIP) selama tahun 2022 bisa dilaksanakan dengan baik. Karena itu melalui kegiatan “Internalisasi Core Value BerAkhlaq dan Employer Branding Pegawai di Lingkungan Sekretariat KIP,” Plt. Sekretaris KI Pusat, Nunik Purwanti menyerukan pentingnya kebersamaan.

Demi pelayanan yang optimal di bidang keterbukaan informasi, diperlukan komitmen bersama untuk fokus pada kinerja, kerja keras dan cerdas, saling mendukung, bahu membahu, saling memback-up, dan produktif. Sembari untuk selalu waspada karena ancaman Covid-19 yang masih menghantui, Nunik berpesan akan pentingnya persatuan.

Menyitir Mattie Stepanek, Nunik berpesan “*Unity is strength, when there is teamwork and collaboration, wonderful things can be achieved*”. Dan satu hal lagi ingin saya sampaikan “*Successful teams don’t happen by accident, they are made not born*” Untuk itu, saya mengajak kita semua bersama mengerjakan bagian kita yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya untuk kemajuan KI Pusat. Tantangan dan hambatan bukanlah penghalang kita untuk terus berkarya bagi negeri.

Di sela-sela kegiatan kegiatan tersebut, para komisioner dan staf perempuan menyempatkan diri membangun keakraban di antaramereka (lihat gambar) demi membangun kekuatan bersama agar bisa berkinerja lebih baik lagi. ■





Demi Informasi Yang Benar dan Berkualitas

Diiringi peragaan busana Indonesia (Indonesia fashion show), perayaan Right To Know Day 2022 (RTKD) oleh Komisi Informasi Pusat (KI) terasa marak. Event yang berlangsung di Museum Bank Indonesia, menjadi panggung gemerlap, tampilnya kekayaan dan eksotisme busana nusantara yang beragam, berwarna dan angung. Tidak hanya pejabat, dan undangan, tapi juga para staf di KI secara bergantian berlenggang lenggok di atas panggung mempertontonkan kekayaan budaya bangsa Indonesia dari Sabang-Merauke.

Pesta bertambah marak, karena di ajang tersebut, juga diadakan dialog diskusi panel lintas generasi dan stake holder antara berbagai elemen seperti pemerintah, raksasa teknologi seperti google, content creator dan pihak

terkait lainnya membahas hak masyarakat atas informasi yang dibuat untuk kepentingan luas.

Mengusung tema "Keterbukaan Informasi Tanpa Batas" event RTKD sangat dinamis karena diskusi membuka cakrawala yang lebih luas keterkaitan informasi, dengan kepentingan politik, kebangsaan serta peran teknologi dalam mentransmisikan informasi kepada masyarakat luas.

Hak Untuk Tahu alias RTKD adalah konsekuensi dari dinamika dan perkembangan sosial dan politik dan sistem demokrasi moderen. Termasuk desakan masyarakat agar masyarakat diberikan akses informasi yang luas tentang apa saja yang dilakukan pemerintah bagi kehidupan mereka.

Ukuran ketersediaan informasi itu diukur dari setidaknya beberapa hal seperti availability,

accessibility dan affordability. Menurut ketua KI, Donny Yoegiantoro, keberadaan KI, berada di tengah kepentingan Badan Publik dan kepentingan publik yang tentu menjadi pertimbangan utama. Karena itu, kata Donny kendati ada kebebasan dan hak publik untuk mengetahui berbagai macam informasi, namun ada batasan-batasan tertentu yang mengatur boleh tidaknya sebuah informasi disampaikan kepada publik. Selain diatur dengan Undang Undang No Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008, serta peraturan pemerintah lainnya, juga tertuang secara konstitusional dalam UUD 45, pasal 28 F.

Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Republik Indonesia Hengki HP Manurung, MM mewakili Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)

mengatakan bahwa dampak keterbukaan informasi sudah sangat dirasakan masyarakat. Contoh sederhana menurut dia adalah kemudahan masyarakat mengurus KTP, serta kemudahan untuk akses informasi. Di Kemenparekraf sendiri semua informasi disajikan secara luas, termasuk hasil kajian ilmiah yang bisa jadi bahan rujukan untuk karya ilmiah di bidang ekonomi pariwisata atau yang terkait dengan industri pariwisata. "Tapi kuncinya informasi itu harus berkualitas dan mengandung pengetahuan," kata Hengki sembari menambahkan event ini bisa mendorong terus keterbukaan informasi publik.

Jurubicara Bank Indonesia, Junanto Herdiawan yang menjadi host dalam diskusi panel mengakui BI sudah makin hari makin terbuka. "BI dulunya (terkesan) serem, tertutup, terkenal dengan misteri, secrecy dan lain sebagainya. Kami bisa

Hak Untuk Tahu (HUT) alias RTKD adalah konsekuensi dari dinamika dan perkembangan sosial dan politik dan sistem demokrasi moderen. Termasuk desakan masyarakat agar masyarakat diberikan akses informasi yang luas tentang apa saja yang dilakukan pemerintah bagi kehidupan mereka.





RTKD sebagai hak universal masyarakat, harus dijadikan sebagai momentum bagi Badan Publik untuk mendeliver informasi kepada masyarakat dengan cara sederhana, biaya ringan dan cepat. Secara khusus, Samrotunajah berharap agar akses informasi ini bisa diperoleh oleh semua orang termasuk kaum disable.

merasakan situasi itu, namun kini nuansa itu sudah makin berubah,"kata Junanto

Komisioner KI Pusat RI, Samrotunajah Ismail mengatakan RTKD sebagai hak universal masyarakat, harus dijadikan sebagai momentum bagi Badan Publik untuk mendeliver informasi kepada masyarakat dengan cara sederhana, biaya ringan dan cepat. Secara khusus, Samrotunajah berharap agar akses informasi ini bisa diperoleh oleh semua orang termasuk kaum disable.

SOLUSI DARI GOOGLE

Ariane Santoso, perwakilan google Indonesia, mengatakan bahwa informasi, harus universal dan bermanfaat bagi masyarakat, karena itu sangat mendukung hak untuk mengetahui. Google dalam kapasitasnya sebagai pendukung demokrasi dan keterbukaan informasi, turut serta untuk mengatasi kondisi misinformasi dan disinformasi yang terjadi belakangan ini membanjirnya informasi di ruang publik.

Karena itu dengan berbagai layanan yang disediakan google akan selalu memberikan informasi yang reliable dengan berbagai fasilitas yang dimiliki raksasa informasi ini. Misalnya mencegah usaha phishing yang jumlahnya mencapai ratusan juta per harinya. Dengan artificial intelligence (AI) yang dimilikinya misalnya bisa mencegah miliaran e-mail scam untuk keamanan dan privasi. Selain itu, pentingnya literasi media dan konteks dari sebuah informasi. Di bidang jurnalisme google berusaha mendorong kualitas jurnalisme yang baik dan berkualitas. Serta tak kalah pentingnya dalam rangka RTKD adalah teknologi yang terus diupdate untukantisipasi ancaman dan perkembangan baru.

Demi informasi yang baik dan benar itu, Ariane mengatakan bahwa google proaktif menyediakan fitur-fitur menjaga keamanan pengguna, mengupdate informasi hasil kerja AI, dan terus aktif bekerja sama misalnya melalui program tular nalar, kerja sama dengan Maarif Institute, dengan para dosen dan mahasiswa untuk kembangkan cara pikir kritis. Setidaknya sudah 26 ribu orang telah masuk dalam program ini. "Tahun ini fokus kami adalah para lanjut usia (lansia) yang sering berkumpul, agar mereka bisa menyaring informasi dengan benar dan menangkal hoax. Sedangkan tahun depan kami akan fokus pada informasi seputar Pemilu, agar masyarakat tercerahkan," kata Ariane.

Content creator dan mantan youtuber Andovi da Lopez, mendukung RTKD terutama di kalangan milenial. Dia sendiri merasakan perubahan level keterbukaan pada lembaga dan badan publik. Karena itu demi

mencegah misinformasi dan disinformasi, dia terus membuat konten di media sosial yang mendidik dan mempromosikan informasi yang benar dan berkualitas dan mencegah gap informasi antar generasi di Indonesia. "Kita harus akhiri perang informasi yang tidak bermutu di tengah masyarakat, dan mendukung kerja pemerintah demi kebaikan bersama," kata Andovi. Dia bersama rekannya aktif mempromosikan pesan-pesan kebangsaan, persatuan, talent lokal dalam setiap karyanya.

Walaupun masih terasa ada birokrasi, namun kondisi sekarang menurut dia, sudah jauh lebih baik. "Saya mau ketemu dirjen sekarang lebih mudah, dan semoga lebih baik ke depan. Keterbukaan informasi kalau kedua belah pihak secara aktif share informasi. *It come from leadership down,*" kata Andovi.

Lebih lanjut Samrotunnajah menambahkan bahwa salah satu target yang mereka capai dalam penyebaran informasi publik adalah kaum disabilitas, karena menurut data, kaum ini yang paling rendah aksesnya terhadap informasi. Berbagai program dengan kerja sama lintas sektoral misalnya sedang dipersiapkan plus teknologi yang memudahkan mereka untuk tetap bisa memperoleh informasi. Di beberapa Badan Publik seperti Bank Indonesia misalnya sudah menyediakan penerjemah bahasa isyarat bagi kaum disabilitas.

Ariane juga menambahkan google sudah membangaun sistem bekerja sama dengan misalnya ICT Watch, Masyarakat Anti Hoax Indonesia (Masindo), BSSN, bahkan dengan OJK untuk mendorong keterbukaan informasi misalnya di sektor keuangan agar konsumen terlindungi dari informasi yang menyesatkan. ■

Google sudah membangaun sistem bekerja sama dengan misalnya ICT Watch, Masyarakat Anti Hoax Indonesia (Masindo), BSSN, bahkan dengan OJK untuk mendorong keterbukaan informasi misalnya di sektor keuangan agar konsumen terlindungi dari informasi yang menyesatkan.





BUKA

Majalah Komisi Informasi Pusat (KIP)